

**MASA AKHIR KEPEMIMPINAN SUKARNO**

**1965 - 1968**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



**Oleh:**

**ALOYSIUS BRAM WIDYANTO**

**NIM: 021314041**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2010**

**SKRIPSI**

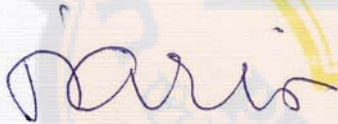
**MASA AKHIR KEPEMIMPINAN SUKARNO 1965-1968**

Oleh:

**ALOYSIUS BRAM WIDYANTO**  
NIM : 021314041

Telah disetujui oleh;

Pembimbing I



Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Tanggal: 20 Januari 2010

Pembimbing II



Drs. B. Musidi, M.Pd.

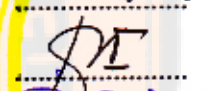
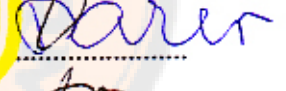
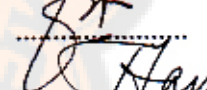
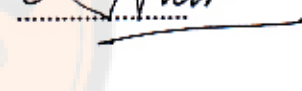
Tanggal: 20 Januari 2010

SKRIPSI

MASA AKHIR KEPEMIMPINAN SUKARNO 1965-1968

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
ALOYSIUS BRAM WIDYANTO  
NIM : 021314041

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 2 Februari 2010  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

| Susunan Panitia Penguji |                               | Tanda Tangan                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap            |                               |                                                                                       |
| Ketua                   | Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si. |   |
| Sekretaris              | Drs. B. Musidi, M.Pd.         |  |
| Anggota                 | Dr. Anton Haryono, M.Hum.     |  |
| Anggota                 | Drs. B. Musidi, M.Pd.         |  |
| Anggota                 | Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.    |  |

Yogyakarta, 2 Februari 2010  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

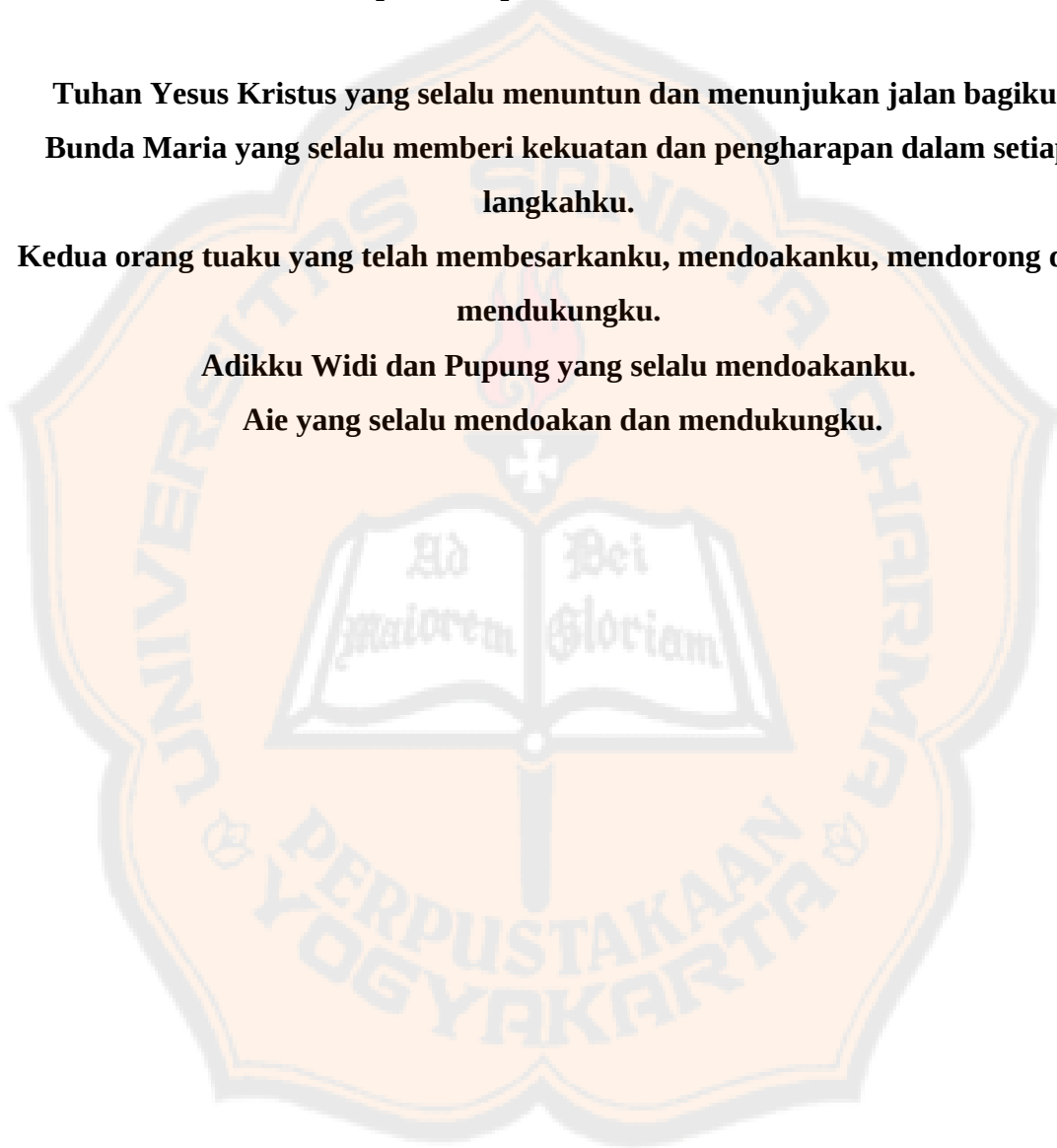
**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

**Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun dan menunjukan jalan bagiku.  
Bunda Maria yang selalu memberi kekuatan dan pengharapan dalam setiap langkahku.**

**Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku, mendoakanku, mendorong dan mendukungku.**

**Adikku Widi dan Pupung yang selalu mendoakanku.**

**Aie yang selalu mendoakan dan mendukungku.**



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### MOTTO

**Banyaklah rencana manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana (Amsal 19: 21)**

**“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.” (Sukarno)**

**Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setelah kita jatuh (Confusius)**



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 2 Februari 2010

Penulis,



Aloysius Bram Widyanto

**ABSTRAK**

**Aloysius Bram Widyanto**  
**021314041**

**Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) latar belakang yang menyebabkan kepemimpinan Sukarno berakhir; (2) proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno; (3) akibat politik, sosial, dan ekonomi dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan ditulis secara deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan psikologis dan politik.

Hasil penelitian ini adalah: (1) salah satu faktor yang melatarbelakangi berakhirnya kepemimpinan Sukarno adalah tragedi G30S; (2) proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno dimulai dari dikeluarkannya Supersemar, sampai kepada ditolaknya pidato pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara); (3) akibat politik berakhirnya kepemimpinan Sukarno adalah pemerintahan beralih ke Suharto dan orang yang dituduh komunis disingkirkan, akibat sosialnya adalah pelarangan koran-koran jaman Orde Lama, standar kesehatan dan pendidikan pun juga masih rendah, dan akibat ekonominya yaitu Indonesia mulai menjalin hubungan dengan luar negeri, termasuk dengan melakukan pinjaman uang yang mengakibatkan semakin besar utang Indonesia.

**ABSTRACT**

**Aloysius Bram Widyanto**  
**021314041**

**The End of Sukarno Leadership 1965-1968**

This study aims to describe and analyze: (1) the background that causes Sukarno's leadership ends; (2) the process of the end of Sukarno's leadership; (3) political, social, and economic consequence from the end of Sukarno's leadership.

The method that was employed was historical descriptive analysis by employing psychological and political approaches.

The results of this study are: (1) one of the factor that becomes the background of the end of Sukarno leadership was the tragedy of G30S.; (2) the process of the end of Sukarno leadership started from the issuance of Supersemar, up to the refusal of Sukarno's responsibility speech (Nawaksara); (3) politically of the end of Sukarno's leadership, the goverment had been handed to Soeharto, who was accused communism to be put aside. Critical newspapers had been banded in the Old Era, besides education and the health of the people were still poor, consequently, Indonesia proposed loan to abroad and economically it made Indonesia become worse and worse in debt.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Aloysius Bram Widyanto

Nomor Mahasiswa : 021314041

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 2 Februari 2010

Yang menyatakan



( Aloysius Bram Widyanto )

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang melimpahkan segala berkat dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968” yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, dukungan maupun informasi yang telah menunjang proses penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma.
3. Dr. Anton Haryono, M.Hum. dan Drs. B. Musidi, M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat disusun.
4. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keluargaku dan teman-temanku (Widi, Pupung, Aie, Wawan, Febri, Nunung, Kris, Ari, Putra) atas doa, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Para Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis



DAFTAR ISI

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....    | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | iii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | iv   |
| HALAMAN MOTTO .....                     | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ..... | vi   |
| ABSTRAK .....                           | vii  |
| ABSTRACT .....                          | viii |
| KATA PENGANTAR .....                    | ix   |
| DAFTAR ISI .....                        | xi   |
| BAB I. PENDAHULUAN                      |      |
| A. Latar Belakang .....                 | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                | 7    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 7    |
| D. Tinjauan Pustaka .....               | 8    |
| E. Kajian Teori .....                   | 11   |
| 1. Kepemimpinan .....                   | 11   |
| a. Pengertian Kepemimpinan .....        | 11   |
| b. Prinsip Kepemimpinan .....           | 12   |
| c. Tipe Kepemimpinan .....              | 13   |
| d. Fungsi dan Asas Kepemimpinan .....   | 13   |
| e. Sifat Kepemimpinan .....             | 14   |
| 2. Partai Politik .....                 | 15   |
| F. Hipotesis .....                      | 17   |
| G. Pendekatan dan Metode .....          | 18   |
| 1. Pendekatan .....                     | 18   |
| 2. Metode .....                         | 18   |
| H. Sistematika Penulisan .....          | 20   |

|          |                                                              |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----|
| BAB II.  | LATAR BELAKANG BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN SUKARNO              |    |
| A.       | Demokrasi Terpimpin .....                                    | 22 |
| 1.       | Ajaran Nasakom.....                                          | 23 |
| 2.       | Ajaran Resopim.....                                          | 23 |
| 3.       | Pembatasan Partai-partai .....                               | 24 |
| B.       | PKI .....                                                    | 24 |
| 1.       | Perkembangan PKI pada Tahun 1965 .....                       | 24 |
| 2.       | Hubungan Sukarno dan PKI .....                               | 25 |
| C.       | Situasi Indonesia pada Tahun 1965 .....                      | 26 |
| 1.       | Politik.....                                                 | 26 |
| 2.       | Ekonomi.....                                                 | 28 |
| 3.       | Sosial.....                                                  | 29 |
| D.       | Tragedi G30S .....                                           | 30 |
| 1.       | Jalannya Tragedi .....                                       | 31 |
| 2.       | Reaksi Sukarno terhadap Tragedi G30S.....                    | 32 |
| 3.       | Dalang Tragedi .....                                         | 38 |
| BAB III. | PROSES BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN SUKARNO                      |    |
| A.       | Soeharto Mulai Muncul .....                                  | 43 |
| B.       | Munculnya Supersemar.....                                    | 45 |
| C.       | Nawaksara.....                                               | 51 |
| BAB IV.  | DAMPAK DARI BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN SUKARNO                 |    |
| A.       | Politik.....                                                 | 60 |
| B.       | Sosial .....                                                 | 64 |
| C.       | Ekonomi .....                                                | 66 |
| D.       | Kehidupan Sukarno setelah Masa Kepemimpinannya Berakhir .... | 69 |
| BAB V.   | PENUTUP                                                      |    |
| A.       | Kesimpulan .....                                             | 71 |
|          | Daftar Pustaka.....                                          | 73 |
|          | Lampiran.....                                                | 76 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sukarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya.<sup>1</sup> Sukarno mendapat pendidikan Belanda sampai pada tahun 1926, ia meraih gelarnya sebagai insinyur sipil. Pada waktu menjalani masa sekolahnya, Sukarno mulai mengenal gerakan kebangsaan di Indonesia yang baru mulai berkembang. Berbeda dengan rekan-rekannya yang lebih suka belajar seperti biasa, Sukarno justru lebih menyukai kegiatan lain. Ia gemar mengikuti perbincangan-perbincangan yang dilakukan oleh para aktivis pergerakan, walaupun sebenarnya ia masih terlalu muda untuk itu. Sukarno juga banyak belajar dari perbincangan tersebut terutama mengenai kehendak untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Tak heran bahwa pada usia 16 tahun, ia memutuskan diri untuk berontak terhadap pemerintah kolonial dan berjuang demi bangsanya.<sup>2</sup>

Di Bandung, Sukarno menyelesaikan studinya sebagai insinyur dalam waktu lima tahun. Setelah menyelesaikan studinya, ia mulai merumuskan sikap dan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk tulisan di majalah Indonesia Muda, pada tahun 1926, yang terdiri dari tiga artikel dan ia beri judul 'Nasionalisme, Islam, Marxisme'. Bertolak dari pengalamannya pada 1921 – yakni dari keterlibatannya dalam Sarekat Islam – Sukarno sudah mulai berupaya memadukan ketiga gagasan yang berkembang waktu itu, yakni nasionalisme, sosialisme, dan Islam.<sup>3</sup> Perpaduan inilah yang kelak akan dimatangkan oleh Sukarno dan akan menjadi semacam benang merah dalam

---

<sup>1</sup> Sukarno sendiri yang menceritakan kepada Solichin Salam bahwa ia dilahirkan di *Lawangseketeng*, Surabaya. Lihat Solichin Salam, *Bung Karno Putra Fajar*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm. 268.

<sup>2</sup> Lambert J. Giebels, *Pembantaian yang Ditutup-Tutupi, Peristiwa Fatal di sekitar Kejatuhan Bung Karno*, terjemahan I. Kapitan-Oen, Jakarta, Grasindo, 2005, hlm. vi.

<sup>3</sup> Baskara T. Wardaya, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G 30 S*, Yogyakarta, Galangpress, 2006, hlm. 38.

kehidupan politiknya. Sukarno juga telah menciptakan Marxisme nasionalis buatan sendiri. Hal itu disebutnya sebagai Marhaenisme. Baskara T. Wardaya mengungkapkan:

Pada suatu kesempatan, ketika ia masih menjadi mahasiswa di Bandung, Sukarno bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen. Petani ini memiliki alat-alat produksinya sendiri dan tidak berada di bawah kekuasaan pemilik pabrik, tetapi ia tetap saja miskin. Sukarno melihat bahwa apa yang dialami oleh Marhaen ini adalah representasi dari mayoritas petani di negerinya. Mereka miskin karena mereka dijajah bangsa asing. Naluri bandel dan pemberontak mendorong Sukarno muda untuk berjuang mengubah nasib yang menimpa Marhaen dan jutaan rekan sebangsanya.<sup>4</sup>

Pada usia 21 tahun, Sukarno memutuskan diri untuk tampil pertama kali di depan publik. Waktu itu ada semacam rapat umum di Bandung yang diselenggarakan oleh kumpulan organisasi pergerakan nasional, *Radical Concentratie*. Pada kesempatan itu, dia meminta waktu untuk ikut menyampaikan orasi politik. Pelototan mata di antara peserta rapat, tidak membuatnya gentar. Ia justru merasa tertantang untuk bersikap bandel dan melawan kekuasaan kolonial. Kepada peserta rapat umum tersebut, ia menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tak terbendung. Ia pun berseru: “Dengan ini saya menantang Pemerintah Kolonial.”<sup>5</sup>

Karier politik Sukarno terus mengalami perkembangan ketika pada tanggal 4 Juli 1927, bertempat di Bandung, ia bersama beberapa orang teman seperjuangannya, mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, biasa disingkat dengan PNI. Tujuan didirikannya PNI adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Selain itu, PNI di dalam menjalankan roda kegiatannya berhaluan nonkooperasi. Nonkooperasi berarti bahwa PNI menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Cara tersebut antara lain dilakukan dengan tidak menduduki kursi dalam organ-organ perwakilan yang didirikan oleh pemerintahan kolonial. Sukarno yang menjadi ketua

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

PNI, tak lama sesudah itu menjadi lambang dari apa yang dikenal sebagai para 'Non-Ko' di Jawa.<sup>6</sup>

Perjuangan Sukarno terus berlanjut sampai pada tahun 1945, ketika ia membacakan teks proklamasi sebagai pertanda kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) untuk negara yang baru lahir tersebut dan menetapkan Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itulah, negara Indonesia berada di bawah pimpinan Sukarno sebagai presiden.

Setelah proklamasi kemerdekaan bukan berarti Indonesia sudah aman dari gangguan dan hambatan. Berbagai peristiwa atau kejadian juga turut mengiringi perjalanan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno sebagai presiden hingga masa akhir kepemimpinan beliau. Peristiwa tersebut antara lain timbulnya gerakan separatis di berbagai daerah, Dekrit Presiden, perubahan sistem pemerintahan, peristiwa G30S yang diduga didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sampai penolakan pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara) oleh MPRS yang menyebabkan ia harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Dari situ jelas dapat dilihat, Indonesia di bawah kepemimpinan Sukarno banyak mengalami perkembangan, selain pencapaian yang gemilang yaitu kemerdekaan, namun diwarnai pula dengan peristiwa yang memprihatinkan dan memilukan.

Di antara berbagai peristiwa tersebut, G30S merupakan sebuah tragedi nasional yang sudah tentu membawa akibat yang begitu meluas di Indonesia, terutama jika dilihat bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi pembantaian massal di berbagai daerah

---

<sup>6</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. xii.

di Indonesia. Peristiwa G30S juga menjadi penyebab khusus dari kejatuhan Sukarno, terutama berkaitan dengan sikap dan reaksi beliau setelah peristiwa itu terjadi,<sup>7</sup> yang menimbulkan rasa tidak puas dari rakyat yang haus akan keadilan dan kebenaran. Ketidakpuasan tersebut terutama karena Sukarno tetap bersikeras tidak mau membubarkan PKI, yang dianggap rakyat sebagai dalang dari peristiwa G30S.

Sebagai gambaran, pada periode 1965, PKI berada di bawah pimpinan D.N. Aidit dan tokoh-tokoh muda lainnya seperti Nyono, Lukman, dan Sudisman yang mulai masuk sejak tahun 1951. Setelah PKI dipegang oleh tokoh-tokoh tersebut, maka PKI mulai melaksanakan strategi perjuangan baru. Strategi tersebut yaitu front persatuan nasional. Ini berarti PKI harus menerima kerja sama dengan partai-partai lain. Di samping strategi tersebut, PKI juga memperluas pengaruhnya dengan membentuk berbagai organisasi massa yang meskipun secara resmi belum bercorak komunis, tetapi sudah ada dalam pengendaliannya, terutama dalam kalangan budayawan (LEKRA), pemuda (PR), dan wanita (Gerwani). Organisasi PKI tersusun rapi, disiplinnya kuat, dan bersih dari berbagai skandal termasuk korupsi.<sup>8</sup>

Selama periode 1951-1965, pemimpin partai telah mengembangkan PKI menjadi partai yang besar. Pada tahun 1951, PKI beranggotakan 10.000 orang, kemudian berkembang pesat pada tahun 1965 dengan beranggotakan sebanyak tiga juta orang dari berbagai suku bangsa. Sebagai partai komunis, PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Tiongkok. PKI merupakan partai yang disegani oleh kawan maupun lawan dan tidak bisa diremehkan.<sup>9</sup> Di samping itu, PKI juga pandai mengeksploitir (memanfaatkan) ketenaran dan

---

<sup>7</sup> John Hughes, *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, USA, Archipelago Press, 2002, hlm. 3.

<sup>8</sup> G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Perang Kemerdekaan pertama sampai PELITA III*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm. 133.

<sup>9</sup> Imam Soedjono, *Yang Berlawanan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta, Resist Book, 2006, hlm. 280.

kewibawaan Presiden Sukarno. Berbagai slogan atau pernyataan Sukarno diambil seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga rakyat banyak yang mengidentifikasikan PKI dengan Sukarno.<sup>10</sup>

Sukarno pun sebenarnya juga membutuhkan dukungan dari PKI sendiri. Hal ini bermula ketika pada akhir tahun 1950-an, sejumlah musuh mulai bermunculan di depan Sukarno. Dari usaha teror untuk melikuidasi Sukarno hingga pemberontakan daerah. Menghadapi situasi yang mengancam kepemimpinannya, wajar saja kalau Sukarno mesti mencari ‘teman’ sebagai pendukungnya. Sukarno pun kemudian mengajak PKI dan PKI dengan senang hati menerima ajakan Sukarno ini. Sukarno menunjuk PKI antara lain karena memandang bahwa PKI merupakan partai massa yang besar, organisasinya teratur dan barisan anggotanya disiplin serta konsekuen. Pilihan terhadap PKI ditegaskan kembali oleh Sukarno dalam pidatonya di depan rapat ulang tahun ke-45 PKI pada bulan Mei 1965 yang berbunyi: “*Yo seneng, yo susah, yen mati aku kudu melu kelangan*”, (Baik senang, baik susah, jika mati aku harus ikut kehilangan), sungguh bukan sikap berpura-pura Sukarno terhadap PKI.<sup>11</sup>

Dalam perayaan tersebut, sekali lagi dapat dilihat bahwa hubungan antara Sukarno dan PKI telah menjadi begitu erat. Perayaan didahului oleh sebuah kongres partai. Stadion Senayan (sekarang Gelora Bung Karno) penuh sesak. Jakarta penuh bendera-bendera palu arit. Ia menyebut PKI sebagai partai revolusioner yang paling konsisten.<sup>12</sup> Itulah gambaran tentang bagaimana hubungan antara PKI dan Sukarno.

Pada tanggal 30 September 1965, di Indonesia terjadi sebuah percobaan kudeta. Enam orang jenderal berhasil diculik. Semua yang terculik, hidup atau mati dibawa ke Lubang Buaya, tangkapan yang masih hidup pun akhirnya ditembak. Semua mayat

---

<sup>10</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>11</sup> Imam Soedjono, *op. cit.*, hlm. 280.

<sup>12</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 34.

dimasukkan ke dalam sumur mati dan ditimbun.<sup>13</sup> Menurut versi resmi dan yang umum berlaku, pelaku dari peristiwa ini adalah PKI sehingga lebih dikenal pula dengan istilah G30S/PKI dengan menekankan pada PKI karena PKI-lah yang menjadi pelaku utamanya. Namun, apakah benar bahwa PKI yang menjadi dalangnya? Ataukah ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat? Sampai sekarang hal itu masih menjadi kontroversi yang terus diperdebatkan. Terlepas dari benar atau tidaknya PKI yang menjadi pelaku utamanya, tragedi tersebut mampu membawa perkembangan dalam sejarah bangsa Indonesia.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Surat perintah itu memberi wewenang untuk 'mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban'. Letjen Soeharto menggunakan surat perintah itu sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Presiden Sukarno, yaitu membubarkan PKI dan mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Kemudian, Supersemar ditingkatkan status hukumnya menjadi Ketetapan MPRS, sehingga tidak bisa lagi dicabut oleh Presiden Sukarno.<sup>14</sup> Setahun setelah Supersemar lahir, Presiden Sukarno pun tersingkir dari kekuasaannya, sehingga beliau pun dengan sendirinya terisolasi secara politik.

Yang menjadi kontroversi sampai sekarang adalah bagaimana sebenarnya bentuk penugasan Supersemar dari Presiden kepada Men/Pangad? Apakah Supersemar merupakan pelimpahan kekuasaan, atau instruksi yang bersifat teknis? Mengapa Letjen Soeharto menggunakan Supersemar untuk menggembosi kabinet? Pertanyaan-

---

<sup>13</sup> Imam Soedjono, *op. cit.*, hlm. 301.

<sup>14</sup> James Luhulima, *Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain*, Jakarta, Kompas, 2007, hlm. 142.

pertanyaan itu membuat orang semakin penasaran, karena hingga detik ini naskah asli Supersemar tidak diketahui rimbanya.<sup>15</sup>

Berawal dari peristiwa G30S hingga dikeluarkannya Supersemar, Indonesia mulai memasuki proses perkembangan ke tahap yang baru dan Sukarno juga memasuki masa akhir kepemimpinannya. Mulai sejak saat itulah pada kesempatan ini akan diadakan penelitian tentang ‘Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968’. Hal tersebut juga didorong oleh keinginan agar beberapa bagian sejarah nasional Indonesia yang dirasa masih kontroversi dapat diungkap, sehingga dengan demikian akan dapat ditemukan kebenarannya.

Dalam penelitian ini diambil batasan waktu antara tahun 1965-1968, dengan alasan karena pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30S. Dalam peristiwa itu, Sukarno dipandang tidak tegas, termasuk oleh rakyat Indonesia sendiri, di dalam mengusut peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, beliau mulai tidak mendapat dukungan dan kepercayaan dari berbagai pihak termasuk rakyat Indonesia. Sedangkan penentuan akhir batasan waktu 1968 karena pada tahun itu merupakan akhir dari masa kepemimpinan Sukarno.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam skripsi yang berjudul “Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno” ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang yang menyebabkan kepemimpinan Sukarno berakhir ?
2. Bagaimana proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno ?
3. Apa akibat politik, sosial, dan ekonomi dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>15</sup> A. Pambudi, *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jendral*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2006, hlm. 9.

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang yang menyebabkan berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
- c. Untuk menganalisis akibat politik, sosial, dan ekonomi dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Sanata Dharma

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian mengenai sejarah nasional Indonesia, yang dapat dilakukan dengan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

### b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang Sukarno terutama memasuki masa akhir kepemimpinannya.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai sejarah nasional Indonesia terutama pada masa akhir kepemimpinan Sukarno.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang ‘Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968’. Dalam membahas topik tersebut, akan digunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Buku yang digunakan sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

*Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September*

Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 oleh Media Pressindo, Yogyakarta. Buku ini berisi kumpulan pernyataan Bung Karno baik yang dituangkan secara resmi maupun tidak resmi, berkaitan dengan G30S. Misalnya ketika Bung Karno menyampaikan amanat berhubungan dengan peristiwa G30S. Beliau menyerukan agar seluruh angkatan bersenjata bersatu padu demi keselamatan negara dan revolusi. Amanat tersebut disampaikan pada tanggal 3 Oktober 1965. Dari buku itu dapat dikaji dan dianalisis mengenai sikap dan reaksi Sukarno terhadap peristiwa G30S.

*Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Bung Karno 30 September 1965 - Pelengkap Nawakara*

Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Ombak, Yogyakarta pada tahun 2005. Buku ini merekam berbagai pergulatan Bung Karno sebagaimana yang disampaikan dalam berbagai pidatonya selama dua tahun, 1965-1967. Misalnya pidato yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1965. Beliau menyatakan bahwa Republik Indonesia tidak gugur dengan adanya peristiwa G 30 S. “*The real fact is that the Republic is not collapsing* (fakta sebenarnya adalah Republik tidak gugur),” begitu tegasnya. Buku ini dapat menjadi sumber untuk memahami Sukarno, khususnya pasca tragedi September 1965.

Selain sumber primer, terdapat juga sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Buku yang digunakan sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

*Pembantaian yang Ditutup-tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*

Buku ini ditulis oleh Lambert J. Giebels, terbitan Grasindo, Jakarta, 2005. Buku ini memaparkan berbagai peristiwa yang mengiringi kejatuhan Sukarno dari kancah kepemimpinannya seperti perkembangan komunisme pada tahun 1965 yang semakin

besar melalui PKI, kemudian ada pula kronologis tragedi G30S, sampai pada masa ketika jatuh dan berakhirnya Sukarno. Buku ini bermanfaat untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi pada masa akhir kepemimpinan Sukarno.

*Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain*

Buku ini ditulis oleh James Luhulima, terbitan Kompas, Jakarta, 2007. Buku ini banyak mengungkapkan berbagai kejadian dalam tragedi G30S. Buku ini bermanfaat karena bisa dikaji tentang peristiwa G30S yang menjadi pertanda dari masa akhir kepemimpinan Sukarno.

*Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G 30 S*

Buku ini ditulis oleh Baskara T. Wardaya, terbitan Galang Press, Yogyakarta, 2006. Buku ini mencoba melihat tragedi 1965 dalam perspektif yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan hidup dan perjuangan Bung Karno. Buku ini bermanfaat karena dapat mengkaji peristiwa G30S dan berbagai dampak yang ditimbulkannya, termasuk bagi kepemimpinan Sukarno. Selain itu melalui buku ini dapat dilihat pula situasi Indonesia setelah berakhirnya kepemimpinan Sukarno dalam berbagai bidang.

*Tragedi Sukarno: Dari Kudeta sampai Kematian*

Buku ini ditulis oleh Reni Nuryanti diterbitkan pada tahun 2008 oleh Ombak, Yogyakarta. Dalam buku ini terdapat berbagai fakta terutama dalam periode lima tahun terakhir kehidupan Sukarno. Dalam buku ini terdapat pula berbagai peristiwa yang mengiringi berakhirnya kepemimpinan Sukarno

*Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jendral*

Buku ini ditulis oleh A. Pambudi, terbitan Media Pressindo, Yogyakarta, 2006. Dalam buku ini, diungkap kesaksian dari tiga jendral, yaitu Mayjen Basuki Rachmat,

Brigjen Amirmachmud, dan Brigjen M. Jusuf, yang memegang peranan dalam Supersemar. Dalam buku ini juga diungkapkan setidaknya ada tiga versi naskah asli Supersemar. Dua versi muncul pada saat terbitnya buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, yang diterbitkan pemerintah Orde Baru, dan yang terakhir versi menurut kesaksian M. Jusuf seperti yang diceritakan dalam biografinya. Buku ini bermanfaat karena dapat dilihat pengungkapan sebenarnya dari Supersemar itu sendiri.

*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*

Buku ini ditulis oleh M.C. Ricklefs, terbitan Serambi Ilmu Pustaka, Jakarta, 2005. Dalam buku ini diungkapkan berbagai situasi di Indonesia termasuk situasi pada masa-masa akhir kepemimpinan Sukarno (1965-1968) dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, dan ekonomi. Seperti misalnya pada halaman 568, yang menceritakan situasi di Indonesia pada tahun 1966 di mana banyak kalangan (seperti mahasiswa) yang menuntut pelarangan PKI yang diduga menjadi dalang dari G30S. Buku ini bermanfaat untuk dapat mengkaji berbagai situasi di Indonesia, terutama pada periode 1965-1968.

## **E. Kajian Teori**

Berkaitan dengan judul skripsi “Masa Akhir Kepemimpinan Soekarno 1965-1968” ini ada beberapa konsep yang perlu dipahami:

### **1. Kepemimpinan**

#### **a. Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri sehingga perilaku orang lain itu berubah atau tetap. Orang yang memiliki kepemimpinan disebut pemimpin.<sup>16</sup>

Menurut Edwin P. Holander sebagaimana yang dikutip oleh S. Yuwono, mengungkapkan :

---

<sup>16</sup> Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Hikmah, 2000, hlm. 76.

*Leadership is a process of influence which involves an ongoing transaction between a leader and followers. The key to effective leadership is in this relationship. Although most attention is give to the leader, leadership depends upon more than a single person to achive group goals. Therefore, the followers as well as the leader are vital to understanding leadership as a process. Followers support the leadership activities and the leader's position.* (kepemimpinan adalah suatu proses pengaruh yang melibatkan suatu transaksi berkelanjutan antara seorang pengikut dan pemimpin. Kunci kepemimpinan yang efektif terdapat dalam hubungan tersebut. Walaupun perhatian lebih banyak ditujukan kepada pemimpin, kepemimpinan tergantung pada lebih dari satu orang guna mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, pengikut seperti halnya pemimpin penting untuk memahami kepemimpinan sebagai sebuah proses. Pengikut mendukung aktivitas kepemimpinan dan posisi pemimpin).<sup>17</sup>

Pengertian lain dari kepemimpinan adalah “suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal.”<sup>18</sup>

Kimbal Young mengungkapkan bahwa kepemimpinan merupakan “bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu; berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.”<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan memiliki unsur kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok; kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain; untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau kelompok.

#### b. Prinsip Kepemimpinan

Kepemimpinan juga memiliki beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan adalah tindakan-tindakan oleh seorang atau beberapa orang yang mempengaruhi kelakuan seseorang atau lebih dalam kelompok. Tindakan-tindakan oleh pemimpin atau kelompok dilakukan dengan suatu maksud. Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang lain. Tindakan-tindakan

<sup>17</sup> S. Yuwono, *Kepemimpinan dalam Organisasi Aparatur Pemerintahan*, Yogyakarta, Liberty, 1983, hlm. 6.

<sup>18</sup> Bernardine R. Wirjana dan Susilo Supardo, *Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2005, hlm. 3.

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 40.

tersebut harus berhasil, paling tidak sebagian. Sedangkan upaya untuk mengubah perilaku yang tidak berhasil merupakan upaya pemimpin yang gagal.

2) Kepemimpinan dapat bersifat kebetulan atau tidak disengaja. Batas yang memisahkan kapan seseorang itu pemimpin dan kapan bukan, sulit dipisahkan. Kita mengenal orang-orang yang menjadi pemimpin karena keteladannya. Mereka berbuat demikian bukan karena pilihan mereka sendiri. Mereka juga mempengaruhi banyak orang.<sup>20</sup>

#### c. Tipe Kepemimpinan

Selanjutnya, kepemimpinan juga dapat dibagi ke dalam beberapa tipe yaitu:

1) Tipe kharismatis: tipe pemimpin kharismatis ini memiliki daya tarik dan wibawa yang luar biasa dan memiliki intelegensi tinggi, sehingga ia mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar. 2) Tipe paternalistik dan maternalistik: tipe kepemimpinan yang kebapakan, dengan sifat-sifat seperti menganggap bawahannya sebagai manusia yang belum dewasa. Tipe kepemimpinan maternalistik juga mirip dengan yang paternalistik, hanya dengan perbedaan: adanya sikap *over-protective* atau terlalu melindungi dan disertai kasih sayang yang berlebihan. 3) Tipe militeristik: sifat-sifat kepemimpinan yang militeristik antara lain: lebih banyak menggunakan sistem perintah terhadap bawahannya, menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya, menuntut adanya disiplin keras, tidak menghendaki saran atau kritikan dari bawahannya, dan komunikasi hanya berlangsung searah saja. 4) Tipe otokratis: kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus dipatuhi. 5) Tipe populistik: kepemimpinan populistik berarti kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat yang menekankan masalah kesatuan nasional dan nasionalisme. 6) Tipe administratif: kepemimpinan tipe administratif adalah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan administratif yang efektif. 7) Tipe demokratis: kepemimpinan demokratis memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahan, dengan penekanan rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik.<sup>21</sup>

#### d. Fungsi dan Asas Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki asas-asas yang baik seperti:

1) Kemanusiaan: mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, pembimbingan manusia oleh manusia, untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu, demi tujuan-tujuan kemanusiaan. 2) Efisiensi: efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber, materiil dan manusia, atas prinsip penghematan, dan adanya

<sup>20</sup> Bernardine R. Wirjana dan Susilo Supardo, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

nilai-nilai ekonomis, serta asas-asas manajemen modern. 3) Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

e. Sifat Kepemimpinan

Sifat-sifat dari kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

1) adanya wibawa: wibawa seorang pemimpin yang dijiwai oleh Pancasila timbul karena kepribadiannya baik. Segala tingkah lakunya selalu didasarkan kepada patokan-patokan atau tuntunan yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. 2) memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing: dengan adanya kewibawaan yang disertai dengan kemampuan mengarahkan dan membimbing, maka seorang pemimpin akan sanggup membawa masyarakat sekitarnya kepada peri kehidupan yang berdasarkan Pancasila. 3) memberi teladan: seorang pemimpin dituntut untuk dapat memberikan teladan sehingga dapat dijadikan panutan oleh masyarakatnya. 4) adanya ketepatan hati atau berpegang teguh pada pendirian (konsisten): seorang pemimpin haruslah kokoh pada pendiriannya yang benar dan berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila. Tingkah yang benar dan berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila. Tingkah lakunya dari hari ke hari haruslah ada kesesuaian dan tidak boleh bertentangan. 5) konsekuen: maksudnya ialah ada keserasian antara kata dan perbuatan, berani menanggung akibat dari perbuatannya, dan berani mengatakan benar untuk hal-hal yang benar, dan salah untuk hal-hal yang salah. 6) adanya semangat kekeluargaan: seorang pemimpin haruslah bersikap sebagai pengasuh yang baik.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Sukarno dapat dimasukkan ke dalam tipe kepemimpinan kharismatis, yaitu memiliki daya tarik dan wibawa yang luar biasa dan memiliki intelegensi tinggi. Sukarno jelas memiliki intelegensi tinggi, sebagai contoh ketika Sukarno menguraikan sila-sila Pancasila dan Demokrasi Terpimpin, ia banyak menggunakan acuan-acuan historis dan menyebut pemikir yang gagasan dan buku-bukunya menjadi bahan wacana internasional pada waktu itu seperti Rosa Luxemburg, Karl Steaurman, K'ung Fu-tse (Confusius), Fritz Adler, Marx, dan Engels. Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno adalah orang yang suka membenamkan diri ke dalam buku-buku untuk belajar sebanyak mungkin. Sukarno juga memiliki banyak inisiatif, seperti ketika ia tidak hanya gemar membaca karya-karya tulis orang Indonesia, akan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1984, hlm. 141.

tetapi ia juga berinisiatif membaca karya-karya orang asing. Ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan hidup yang terbuka, mau belajar dari siapa pun asal itu berguna bagi diri dan perjuangannya. Tidak kalah pentingnya adalah Sukarno juga sangat menguasai berbagai bahasa asing. Dalam uraian-uraianya, dengan enak ia menggunakan istilah-istilah dari macam-macam bahasa, dari bahasa Belanda sampai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, kadang-kadang bahkan istilah-istilah China atau Hindi.<sup>24</sup> Hal ini juga mampu menunjukkan bahwa Sukarno adalah seorang pemimpin yang komunikatif.

Tetapi memasuki periode 1965, sampai ketika memasuki tahun akhir kepemimpinan Sukarno pada 1968, kepemimpinan Sukarno cenderung memiliki gaya penguasa tunggal. Di satu pihak dapat dipahami bahwa sikap-sikap penguasa tunggal yang diambil oleh Sukarno merupakan reaksi terhadap tekanan-tekanan politik dalam negeri (Angkatan Darat, PKI, dan partai-partai lain), maupun terhadap berbagai gejolak internasional, terutama berkaitan dengan Perang Dingin. Di lain pihak, dapat dipahami bahwa sebenarnya pendekatan model pemimpin tunggal yang diambil oleh Sukarno itu dapat menimbulkan akibat sosial-politis yang merugikan<sup>25</sup>, sampai akhirnya ia harus rela lengser dari jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut juga sesuai dengan teori kepemimpinan situasi, artinya bahwa Sukarno harus menyesuaikan kepemimpinannya terhadap berbagai tuntutan situasi dan zamannya dan tentu harus disesuaikan ke dalam berbagai bidang kehidupan juga.

## 2. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini

---

<sup>24</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 210.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.”<sup>26</sup>

Sedangkan Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik sebagai “organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.”<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik juga memiliki beberapa fungsi di dalam suatu negara, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik  
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik  
Sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Proses sosialisasi politik biasanya diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.
- c. Partai politik sebagai sarana *recruitment* (mengerahkan) politik  
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik  
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.

Partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan di antara lain:<sup>29</sup>

- a. Sistem partai-tunggal

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm. 162.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

Sistim partai-tunggal digunakan untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif oleh karena partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu.

b. Sistim dwi-partai

Pengertian sistim dwi-partai diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Dalam sistim ini partai-partai jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum). Sistim dwi-partai ini dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen, konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah.

c. Sistim multi-partai

Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman dalam komposisi masyarakat menjurus ke berkembangnya sistem multi-partai. Di mana perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primordial) tadi dalam satu wadah saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik daripada pola dwi-partai.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah:

1. Kalau masa kepemimpinan Sukarno berakhir, maka salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah tragedi G30S.
2. Kalau masa kepemimpinan Sukarno berakhir, maka proses yang mengiringinya adalah dikeluarkannya Supersemar dan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara).
3. Kalau kepemimpinan Sukarno berakhir, maka akibat politiknya adalah pemerintahan beralih ke Soeharto dan orang yang dituduh komunis disingkirkan, akibat sosialnya adalah pelarangan koran-koran jaman Orde Lama, standar kesehatan dan pendidikan pun juga masih rendah, dan akibat ekonominya yaitu Indonesia mulai menjalin hubungan dengan luar negeri, termasuk dengan melakukan pinjaman uang yang mengakibatkan semakin besar utang Indonesia.

## **G. Pendekatan dan Metode**

### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan psikologis. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisa berbagai peristiwa yang mengiringi berakhirnya kepemimpinan Sukarno. Lebih tepatnya lagi bagaimana berbagai peristiwa itu akhirnya dapat menjadi penyebab berakhirnya kepemimpinan Sukarno.

Pendekatan psikologi dapat menganalisa latar belakang psikologis, motif-motif, dan hasrat manusia yang berusaha menggunakan kekuasaan.<sup>30</sup> Di dalam penelitian ini, pendekatan psikologis digunakan untuk menganalisa berbagai sikap dan tindakan Sukarno di dalam menggunakan kekuasaannya sehingga kepemimpinannya dapat terus dipertahankan, walaupun nanti akhirnya harus berakhir pada tahun 1968 dan digantikan oleh Soeharto.

### **2. Metode**

Dalam penelitian ini diperlukan pula suatu metode yang ilmiah dengan tujuan agar fakta-fakta yang ada dapat diungkap dan dianalisa sehingga kebenaran dari suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat diketahui secara tepat.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penelitian ini termasuk penelitian sejarah dan oleh sebab itu metode sejarah merupakan metode yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini. Adapun tahap-tahap dalam penelitian sejarah adalah:<sup>31</sup>

#### **a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan

<sup>30</sup> Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Ghalia, 1984, hlm. 31.

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Benteng Budaya, 2001, hlm. 89.

dan berbagai tempat lain, berupa buku, majalah, surat kabar, dokumen, data dari internet, baik itu yang bersifat primer maupun sekunder.

### b. Kritik Sumber

Setelah semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakeaslian.<sup>32</sup> Kritik sumber juga terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk meneliti kebenaran dari isi dokumen yang ada sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan dalam penulisan.

### c. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan apabila data telah terseleksi dan teruji kebenarannya. Dalam interpretasi terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang telah diuji kebenarannya. Pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu menguraikan subyektifitas yang biasa muncul dalam historiografi.

Meskipun demikian, subyektifitas dalam penulisan sejarah tidak bisa dihindari karena kejadian sejarah dalam arti obyektif dimasukkan, dicemari, dialami ke pikiran subyek sebagai persepsi, tidak akan pernah tetap murni atau jernih tetapi telah diberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata/selera subyek. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin agar penelitian dapat mendekati kenyataan yang sebenarnya.

### d. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau digambarkan dalam bentuk rekonstruksi dan mengandung aspek kronologis. Dalam penelitian ini

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

akan menggunakan metode diskripsi analitis<sup>33</sup>. Metode diskripsi analitis merupakan metode yang akan memaparkan rangkaian tulisan yang mendeskripsikan sekaligus juga menganalisa tentang masa akhir kepemimpinan Sukarno.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi dengan judul “Masa Akhir Kepemimpinan Sukarno 1965-1968” memiliki sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Bab ini akan memaparkan dan menganalisa latar belakang berakhirnya kepemimpinan Sukarno yang mencakup biografi Sukarno, perkembangan PKI, hubungan PKI dengan Sukarno, situasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia pada tahun 1965, terjadinya tragedi G30S serta dalang dari tragedi.
- Bab III. Bab ini akan menguraikan dan menganalisa proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno yang mencakup mulai munculnya Soeharto, dikeluarkannya Supersemar, dan ditolaknya pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara).
- Bab IV. Bab ini akan menjelaskan dan menganalisa dampak dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno dalam berbagai bidang kehidupan yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial serta kehidupan Sukarno setelah masa kepemimpinannya berakhir.
- Bab V. Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.

---

<sup>33</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm. 62.

## BAB II

### LATAR BELAKANG BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN

#### SUKARNO

Memasuki masa-masa akhir kepemimpinannya, Sukarno banyak mendapat halangan. Seperti ketika ia tak lagi memiliki pendamping. Hatta meninggalkannya sejak tanggal 31 Desember 1956. Secara psikologis, semenjak berpisah dengan pendampingnya inilah, Sukarno seperti kehilangan arah. Sikap politiknya makin ‘membabi buta’, keinginannya sukar ditolak, apa yang diinginkannya harus dituruti. Sikapnya yang arogan dan otoriter makin tampak dalam gaya bicaranya baik lisan maupun tulisan. Tidak jarang, saat suasana hati memanas, Sukarno tak segan-segan berkata kasar. Dia begitu benci jika perintahnya tidak dipatuhi. Pernah dia mengatakan, “Saya merasa dikentuti”.<sup>34</sup> Sukarno juga bisa seketika marah jika peringatannya tidak diindahkan. Suatu ketika dia berucap, “Kalau kalian masih menyukai saya, pertahankan saya. Kalau tidak, lempar saja saya keluar.”<sup>35</sup> Ini menunjukkan bahwa Sukarno juga memiliki tipe kepemimpinan yang otokratis. Kepemimpinan otokratis itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus dipatuhi.<sup>36</sup>

Tabiat Sukarno juga cepat berubah. Ia bisa bersikap begitu lembut, tetapi seketika dapat berubah dalam saat-saat tertentu. Ekspresi kata-katanya kasar, meski dia mengaku sebagai pecinta seni dan keindahan. Sukarno terlihat begitu tempramen. Wajar, beribu persoalan berkecamuk dalam dada, membuat psikisnya labil dan tidak bisa menahan diri. Sikap semacam ini sebenarnya terlihat menguat ketika Sukarno

---

<sup>34</sup> Asvi Marwan Adam, “Kata Pengantar” dalam Budi Setyono dan Bonnie Triyana (Penyt.), *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara*, Semarang, MESIASS, 2006, hlm. xxvii.

<sup>35</sup> Indra Ismawan dkk, *Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September: Benarkah Gerakan 30 September Didalangi Bung Karno?*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2006, hlm. 22.

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 45.

mulai mendeklarasikan keinginan tentang sosialisme Indonesia. Sukarno menginginkan rakyat memahami keinginannya untuk membangun sosialisme Indonesia. Begitu kuat tekad Sukarno untuk membangun semangat sosialisme, hal itu diucapkan lantang kala bertemu massa, dalam suasana pidato yang hingar bingar.<sup>37</sup> Kepemimpinan Sukarno menjadi sangat dominan dan terpusat ketika ia mulai melaksanakan apa yang disebut dengan Demokrasi Terpimpin.

#### **A. Demokrasi Terpimpin**

Masa Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966. Masa itu berawal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan berakhir dengan kejatuhan Sukarno. Disebut 'terpimpin' karena demokrasi Indonesia ketika itu amat mengandalkan kepemimpinan Presiden Sukarno. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Liberal. Semasa Demokrasi Liberal, kekuasaan presiden terbatas sebagai kepala negara. Kuasa pemerintahan dilaksanakan oleh partai-partai. Semasa Demokrasi Terpimpin, kebebasan partai-partai dibatasi, sedangkan presiden cenderung berkuasa mutlak, sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan yang berlawanan itu sudah tentu berpengaruh terhadap perkembangan politik dan pemerintahan.<sup>38</sup>

Semasa Demokrasi Liberal yang menganut sistem kabinet parlementer, presiden seolah menjadi simbol saja. Presiden tidak memiliki kuasa apapun dalam pemerintahan. Dengan alasan memulihkan stabilitas politik dan menggalang persatuan nasional, semasa Demokrasi Terpimpin, presiden memegang kendali pemerintahan secara mutlak. Sejumlah gejala yang memperlihatkan kedudukan sentral presiden dalam pemerintahan dapat dilihat dalam beberapa hal.

---

<sup>37</sup> Reni Nuryanti, *Tragedi Sukarno: Dari Kudeta Sampai Kematianannya*, Yogyakarta, Ombak, 2008, hlm. 6.

<sup>38</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 508.

## 1. Ajaran Nasakom

Pada masa Demokrasi Liberal, persatuan Indonesia dirasa masih belum padu. Hal itu terjadi karena belum terbentuknya pemahaman yang sama mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman pemahaman itu turut diakibatkan oleh beraneka ragam paham yang dianut partai-partai ketika itu. Menyadari hal tersebut, Presiden Sukarno berupaya membentuk pemahaman yang sama, semasa Demokrasi Terpimpin. Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara itu disatukan dalam ajaran yang disebut Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Bagi presiden, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, persatuan Indonesia akan terwujud.<sup>39</sup>

Sejak diumumkan, ajaran Nasakom secara gencar dipopulerkan ke dalam berbagai lapisan masyarakat. Pemasyarakatan ajaran itu semakin memperkuat kedudukan presiden. Hal itu tampak dari kesan menolak Nasakom sama dengan menolak Sukarno. Gencarnya pemasyarakatan Nasakom juga dimanfaatkan oleh PKI untuk menampilkan diri. Partai tersebut menyebut diri sebagai barisan terdepan pembela Nasakom.<sup>40</sup>

## 2. Ajaran Resopim

Apabila Nasakom ditujukan untuk menggalang persatuan bangsa, ajaran Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) jelas ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Resopim mulai diumumkan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan ke-16, pada tanggal 17 Agustus 1961. Ajaran itu menekankan bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional

---

<sup>39</sup> G. Moedjanto. *op. cit.*, hlm. 117.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

yang disebut Pemimpin Besar Revolusi (PBR). PBR itu tak lain adalah Presiden Sukarno sendiri. Akibat pemasyarakatan Resopim, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditempatkan di bawah pemerintah. Hal itu tampak dari pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga-lembaga tersebut. Padahal menteri berkedudukan sebagai pembantu presiden.<sup>41</sup>

### **3. Pembatasan Partai-partai**

Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah, terutama presiden. Kuatnya kedudukan presiden itu tampak dari tindakan pembubaran dua partai yang pernah berjaya semasa Demokrasi Liberal. Kedua partai itu adalah Masyumi dan PSI (partai Sosialis Indonesia), yang resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. Pertimbangan pembubaran adalah keterlibatan sejumlah anggota kedua partai dalam pembentukan PRRI dan Permesta.<sup>42</sup>

## **B. PKI**

### **1. Perkembangan PKI pada Tahun 1965**

Di tahun 1965, PKI mengungkapkan bahwa partai tersebut memiliki tiga setengah juta anggota dan selain itu masih mempunyai dua puluh tiga juta pengikut dalam organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, yaitu buruh komunis SOSBI, partai petani BTI, partai wanita GERWANI, dan partai Pemuda Rakyat. Jadi, secara total hampir dua puluh tujuh juta orang. Sebagian besar penganutnya terdiri dari orang-orang komunis nominal yang tidak tahu tentang ajaran Marxis. Walaupun demikian, PKI dengan organisasi-organisasinya tetap membentuk satu kesatuan yang berkuasa.<sup>43</sup> Hal

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>42</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 529.

<sup>43</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 135.

ini juga menunjukkan bahwa PKI telah mampu melaksanakan salah satu fungsi dari partai politik yaitu sebagai sarana *recruitment* (mengerahkan) politik.<sup>44</sup>

Dalam periode 1965, PKI dipimpin oleh tokoh-tokoh muda seperti D.N. Aidit, Nyono, Lukman, dan Sudisman. Pimpinan baru PKI tersebut melaksanakan strategi perjuangan yang baru pula yaitu front persatuan nasional. Ini berarti PKI harus menerima kerja sama dengan partai-partai lain, terutama yang secara tidak prinsipil atau tegas anti komunis. PNI dan Sukarno pun didekati dan hasilnya mulai terlihat. Partai yang anggotanya banyak dibantai oleh PKI pada pemberontakan Madiun, mau berdamai dan melupakan kekejaman-kekejaman PKI.<sup>45</sup> PKI pun juga berhasil memanfaatkan ketenaran dan kewibawaan Presiden Sukarno. Berbagai slogan atau pernyataan Sukarno diambil seolah-olah itu slogan atau pernyataan PKI, sehingga banyak rakyat yang mengidentifikasikan PKI dengan Sukarno.

## **2. Hubungan Sukarno dan PKI**

Hubungan antara Sukarno dan PKI telah menjadi begitu erat, terbukti sewaktu perayaan 40 tahun berdirinya partai komunis itu. Stadion Senayan (sekarang Gelora Bung Karno) penuh sesak. Gambar tokoh-tokoh komunis yang nampak lebih besar daripada ukuran sebenarnya, dan gambar yang terbesar adalah gambar Sukarno sendiri, dari atas memandang ke hadirin yang berada di bawah, di dalam stadion. Jakarta penuh bendera-bendera palu arit. Angkatan Udara menyebarkan pamphlet di atas ibu kota berisi ucapan-ucapan selamat ke PKI. Pidato-pidato di dalam stadion dibuka oleh lagu-lagu yang dinyayikan sebuah paduan suara yang terdiri dari sepuluh ribu penyanyi, demonstrasi gerak badan oleh seribu olahragawan dan pementasan oleh para penari pedang China. Panggung kehormatan penuh dengan orang-orang terkemuka dunia

---

<sup>44</sup> Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 162.

<sup>45</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 133.

komunis. Sambutan besar yang diberikan Sukarno benar-benar sebuah pernyataan cinta kepada PKI dan pemimpinnya Aidit, yang dipeluk oleh presiden, sebuah kebiasaan yang sungguh-sungguh bukan cara Indonesia. Ia menyebut PKI sebagai partai revolusioner yang paling konsisten dan Aidit sebagai benteng pertahanan republik. Untuk menunjukkan keterkaitannya dengan saudara-saudara komunisnya, presiden berseru bahwa kematian mereka akan ia anggap sebagai kematiannya sendiri. Bagi orang Jakarta demonstrasi kekuasaan komunis itu meninggalkan kesan yang mendalam.<sup>46</sup>

Walaupun demikian, hubungan Sukarno dan PKI juga mendapat halangan. Seperti yang datang dari Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dengan dimotori oleh Sayuti Melik, B.M. Diah, Adam Malik, dan Sukarni. Perhatian dari gerakan ini adalah untuk menghalangi Sukarno dalam mengidentifikasikan dirinya dengan PKI dan menghimbau dia untuk mempertahankan ide-idenya sendiri di hadapan komunisme. Dalam beberapa saat BPS didirikan, telah banyak pihak yang mendukung, seperti pers non-komunis, selain itu juga mendapat dukungan dari menteri Nasution, panglima angkatan perang Ahmad Yani dan beberapa partai non-komunis, semisal partai MURBA yang di dalamnya terdapat dua orang kabinet yaitu Chairul Saleh dan Adam Malik. Tetapi akhirnya BPS pun dibubarkan oleh Sukarno dengan alasan telah menyebabkan perpecahan dalam kekuatan-kekuatan revolusi yang progresif'.<sup>47</sup>

### **C. Situasi Indonesia pada Tahun 1965**

#### **1. Politik**

Di bidang politik, pada tanggal 7 Januari 1965, Sukarno memutuskan bahwa Indonesia menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasannya adalah

---

<sup>46</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

karena Sukarno tidak senang kalau Malaysia di tahun berikutnya akan menjadi anggota Dewan Keamanan, untuk itu dia mengeluarkan ancaman akan menarik negaranya dari PBB dan hal itu memang sungguh-sungguh dilakukannya. Alasan lainnya adalah bahwa PBB telah dikuasai oleh Oldefos (*Old Established Forces* yang identik dengan kapitalis-imperialis, lawannya Nefos, *New Emerging Forces*). Baru kali itulah sebuah negara keluar dari keanggotaan PBB. Bahkan PBB sendiri tidak pernah membuat suatu prosedur bagaimana pengaturannya jika ada negara anggotanya yang ingin keluar dari keanggotaan PBB. Kemudian pada tanggal 21 Januari 1965, wakil Indonesia di PBB, Nico Palar, menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB surat dari presiden yang memberitakan resminya Indonesia keluar dari keanggotaan PBB dan semua organisasinya.<sup>48</sup>

Di awal tahun 1965, selain keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB, Sukarno juga mengeluarkan keputusan yang cukup mengejutkan, yaitu pelarangan partai MURBA. Dengan dilarangnya MURBA, posisi dua menteri dalam presidium kabinet, Chairul Saleh dan Adam Malik, menjadi sulit. Adam Malik dengan sikap pasrah menerima pembubaran partai yang dulu pernah diketuainya. Sedangkan Chairul Saleh masih berusaha dengan segala macam cara untuk membuktikan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan MURBA. Kedua penganut setia Bung Karno ini tetap menduduki posisi mereka sebagai menteri – walaupun Adam Malik harus menyerahkan sebagian dari wewenangnya kepada Subandrio dan Chairul Saleh kehilangan supervisi atas perindustrian.<sup>49</sup> Dengan dibubarkannya partai MURBA ini, tentu semakin menguatkan posisi PKI. Hal ini pula yang semakin memberi bukti kepada orang-orang bahwa Sukarno benar-benar menginginkan PKI memegang kekuasaan. Hal ini juga

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>49</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 548.

dapat menunjukkan bahwa Sukarno memiliki tipe kepemimpinan yang otokratis di mana setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi.<sup>50</sup> Dia secara sepihak membubarkan MURBA tanpa ada konsultasi terlebih dahulu.

## 2. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, perekonomian Indonesia nyaris hancur. Ekonomi terpimpin yang diterapkan di bawah Demokrasi Terpimpin Sukarno, di tahun 1965 arahnya menuju keruntuhan total. Laju inflasi semakin meninggi. Dalam waktu satu tahun, biaya kehidupan naik dengan beberapa ratus poin. Harga-harga barang juga mengalami peningkatan sekitar 500% selama tahun itu. Produksi bidang industri, oleh karena kekurangan suku cadang mesin-mesin dan kekurangan bahan baku, menurun sampai 20% dari kapasitasnya. Sementara itu, hutang luar negeri meningkat sampai 2,4 milyar dolar. Kelonggaran anggaran hampir seluruhnya terpakai oleh biaya-biaya pertahanan dan pembelian beras. Pengeluaran-pengeluaran militer, yang mulai menurun setelah penyerahan Irian Barat, oleh karena konfrontasi dengan Malaysia di tahun 1964, kembali meningkat. Sukarno telah memerintahkan penduduk untuk di samping mengkonsumsi nasi, juga mengkonsumsi jagung dan singkong sebagai makanan sehari-hari. Himbauan itu agak menurunkan konsumsi beras, tetapi panen yang buruk dan hama tikus di tahun 1964 memaksa pemerintah untuk mengimpor lebih dari satu juta ton beras.<sup>51</sup>

Mundurnya ekonomi seperti biasanya paling dirasakan di daerah perkotaan, di mana di dalam kampung-kampung yang kumuh orang menderita kelaparan dan anak-anak dengan berbondong-bondong mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Dengan uang kertas yang hampir tidak ada nilainya yang diterima para petani untuk

---

<sup>50</sup> Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>51</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 57.

hasil buminya, mereka harus membayar hutang-hutang mereka. Untuk selebihnya dalam perekonomian desa, diberlakukan lagi sistem barter.<sup>52</sup>

### 3. Sosial

Dalam bidang sosial, banyak dihadapi masalah kesejahteraan. Pegawai negeri dengan gaji yang kecil dan tukang-tukang yang digaji oleh pemerintah, hanya datang bekerja beberapa jam sehari dan selanjutnya mencari uang dengan berbagai macam pekerjaan tambahan. Korupsi telah menembus ke lapisan-lapisan masyarakat yang terbawah<sup>53</sup> Di daerah pedalaman, PKI mengerahkan semua kekuatannya untuk pelaksanaan undang-undang *land reform* yang memang telah diperjuangkannya. Organisasi tani milik PKI, BTI (Barisan Tani Indonesia) mulai menjalankan aksi sepihak. Para petani tidak bertanah dihasut untuk bertindak sesuka hati dan menyita tanah milik para tuan tanah. Aksi-aksi sepihak para petani di desa-desa menumbuhkan suatu rasa kebencian terhadap orang-orang komunis, yang lalu diresapi oleh kecenderungan-kecenderungan Islam. Dengan aksinya ini, PKI ingin memancing suatu perjuangan antar golongan di daerah pedesaan, antara para petani kaya dan miskin. Akhirnya yang saling berhadap-hadapan bukannya dua golongan melainkan dua aliran, yaitu para abangan yang juga dikenal dengan sebutan 'Islam KTP' dan para santri, yaitu orang Islam ortodoks. Para pemimpin Islam dengan menggunakan pesan sang Nabi, menghasut para petani miskin melawan kaum komunis yang tidak bertuhan. Di daerah pedesaan Jawa, aksi sepihak semacam itu terancam berkembang menjadi jihad. Di beberapa tempat, seperti di Jawa Timur kadang-kadang ada pertikaian antara mereka yang menjalankan aksi melawan para tuan tanah dan pengikut-pengikut mereka, yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

oleh karena campur tangan polisi memburuk menjadi kekerasan fisik, bahkan sampai jatuh korban jiwa.<sup>54</sup>

Ketegangan pun semakin bertambah, konfrontasi yang terjadi antara BTI dengan golongan Islam dan angkatan bersenjata makin meyakinkan Aidit bahwa mempersenjatai kaum tani dan buruh, sangat penting untuk diterapkan. Usahanya itu akhirnya membawa hasil. Pada tanggal 1 Juni 1965, presiden memerintahkan para komandan empat angkatan untuk membantu mempersenjatai dan melatih sebuah angkatan ke-5. Dalam hal ini, Sukarno didukung oleh Umar Dani, kepala staf Angkatan Udara. Admiral Edy Martadinata juga menyetujui rencana ini. Komandan Angkatan Darat, Ahmad Yani menolak adanya angkatan ke-5 ini karena ia tidak mau melepaskan monopoli senjata angkatan bersenjata. Tetapi ia mau menyetujui sebuah pertahanan sipil yang tidak bersenjata. Pertahanan sipil ini diberi nama Hansip. Hansip sebenarnya suatu kompromi yang berbahaya: PKI menganggapnya sebagai suatu angkatan ke-5, tentara sebagai semacam pertahanan sipil. Pada tanggal 27 September 1965, Yani akhirnya mengumumkan bahwa angkatan darat menentang pembentukan angkatan kelima tersebut.<sup>55</sup>

#### **D. Tragedi G30S**

Tahun 1965 boleh jadi merupakan titik balik bagi Sukarno, termasuk peristiwa G30S. James Luhulima menyebut tanggal 1 Oktober 1965 sebagai titik yang menentukan kehidupan Sukarno di masa lanjut. Luhulima mengatakan bahwa mulai 1 Oktober 1965, Presiden Sukarno bukan lagi merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi di Indonesia. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Oei Tjoe Tiat, pembantu Presiden Sukarno. Ia mengungkapkan dalam memoarnya bahwa dengan cepat iklim

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>55</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 155.

dan suasana politik di ibu kota bergeser 180 derajat. Menurut pengamatannya, sejak tanggal 1 dan 2 Oktober 1965, kekuasaan *de facto* sudah terlepas dari tangan presiden selaku penguasa Republik Indonesia. Mendadak Sukarno kehilangan kekuatan dan pendukungnya menghilang dalam kekalutan arus politik.<sup>56</sup>

### 1. Jalannya Tragedi

Seperti diketahui, pada tanggal 30 September malam 1 Oktober 1965, ketegangan-ketegangan meletus karena terjadinya percobaan kudeta di Jakarta. Pada tanggal 30 September malam itu, satu batalyon pengawal istana yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, satu batalyon dari Divisi Diponegoro, satu batalyon dari Divisi Brawijaya, dan orang-orang sipil dari Pemuda Rakyat PKI meninggalkan pangkalan udara Halim. Mereka pergi untuk menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Mayjen Soeprapto, Mayjen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Mayjen M.T. Haryono, serta Brigjen Sutojo, dari rumah-rumah mereka di Jakarta.<sup>57</sup>

Jenderal Ahmad Yani, Mayjen M.T. Haryono, dan Brigjen Panjaitan dibunuh di rumah mereka karena melawan ketika hendak ditangkap. Nasution berhasil meloloskan diri serta melewati sisa malam itu dan sebagian esok harinya di tempat persembunyiannya. Tetapi putrinya yang baru berusia lima tahun, Ade Irma Suryani, tertembak dan kemudian meninggal pada tanggal 6 Oktober 1965 dan salah seorang ajudannya, Kapten Pierre Tendean ditangkap. Ajudan ini, mayat ketiga jenderal tadi, dan tiga orang jenderal lainnya yang berhasil ditangkap hidup-hidup dibawa menuju Halim. Di sana, Parman dan ketiga orang tawanan lain yang masih hidup dibunuh

<sup>56</sup> James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 177.

<sup>57</sup> Sulastomo, *Hari-hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 129.

secara kejam. Ketujuh mayat itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang sudah tidak terpakai lagi.<sup>58</sup>

Pagi hari tanggal 1 Oktober, dalam warta berita radio pukul 7 pagi, dibacakan sebuah komunike (pengumuman atau pemberitahuan resmi dari pemerintah<sup>59</sup>) yang dikeluarkan oleh apa yang disebut Gerakan 30 September. Komunike menyatakan bahwa pada malam harinya, Angkatan Darat dengan dibantu oleh bagian-bagian dari angkatan yang lain, beraksi untuk mencegah sebuah kup jenderal yang kontra revolusioner. Komunike memberitahukan bahwa para anggota dewan jenderal telah ditahan, beberapa gedung vital di pusat kota telah diamankan dan presiden berada di bawah perlindungan Gerakan 30 September. Komunike menekankan bahwa aksi ini merupakan urusan intern angkatan bersenjata dan akhirnya mengumumkan pendirian sebuah dewan revolusioner yang terdiri dari unsur-unsur militer dan sipil yang mendukung tujuan Gerakan 30 September.<sup>60</sup>

## **2. Reaksi Sukarno terhadap Tragedi G30S**

Tanggal 30 September 1965, sebelum tragedi berlangsung, Sukarno pergi ke rumahnya di Wisma Yaso di Slipi di mana ia bermalam. Sepanjang malam di Wisma Yaso, masuk sebuah berita telepon bahwa telah terdengar bunyi tembakan di jalan tempat tinggal Jenderal Nasution. Sukarno kemudian mengutus seorang pengawal pribadinya untuk melihat apa yang telah terjadi. Ketika orang yang harus mencari informasi itu masih juga belum kembali, Sukarno pun akhirnya memberi perintah untuk berangkat ke istana. Di tengah perjalanan, Sukarno mendapat kabar dari wakil komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan bahwa terdapat pasukan-pasukan yang tidak teridentifikasi berada di sekeliling istana. Melihat hal tersebut, Sukarno pun tidak

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op. cit.*, (online).

<sup>60</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 90.

jadi datang ke istana melainkan pergi ke rumah Haryati<sup>61</sup>. Di rumah Haryati itulah, Sukarno mendengar tentang penculikan Yani, tentang penculikan Nasution yang tidak berhasil dan tentang pasukan tentara yang misterius di sekitar istana.<sup>62</sup>

Segera setelah mendapat kabar tersebut, Sukarno pun dibawa ke pangkalan udara Halim untuk mengamankan diri. Alasan pemilihan Halim adalah karena pesawat udara presiden diparkir di pangkalan udara militer itu, sehingga kalau perlu presiden bisa segera pergi mencari tempat yang aman. Sesampainya di Halim, Sukarno mendapatkan informasi tentang Gerakan 30 September. Di sisi lain, keberadaan Sukarno di tempat ini, justru menimbulkan kontroversi banyak pihak. Muncul tuduhan mengenai keterlibatannya dalam G30S. Dengan mendatangi tempat tersebut, di mana Untung yang disebut-sebut sebagai dalang kudeta, masyarakat akan menilai, Sukarno telah bersekongkol dengan PKI untuk menjatuhkan AD. Ternyata benar, keberadaan Sukarno menuai konflik. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Soeharto dan jajarannya untuk memojokkan Sukarno. Sukarno bahkan semakin ditekan untuk segera membubarkan PKI.<sup>63</sup>

Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1965 pagi, wakil komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Saelan menghadap Presiden Sukarno di Istana Bogor dan menyampaikan laporan tentang situasi terakhir, termasuk mengenai telah ditemukannya Bhayangkara Polisi II Sukitman<sup>64</sup> yang lolos dari pasukan G30S. Dengan berbekal informasi dari Sukitman, Presiden Sukarno pun menginstruksikan Kolonel Saelan untuk mencari tahu nasib keenam jenderal dan seorang perwira pertama

<sup>61</sup> Haryati adalah salah seorang istri Sukarno pada waktu itu. Lihat Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>62</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 97.

<sup>63</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>64</sup> Bhayangkara Polisi II Sukitman pada waktu tragedi G30S, sedang berpatroli di sekitar rumah Brigjen Panjaitan. Saat melintas ia mendengar suara tembakan dan saat ia sampai di sana, ia kemudian ditangkap dan dibawa ke Desa Lubang Buaya. Ia pun akhirnya dapat ditemukan oleh patroli Tjakrabirawa. Lihat James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 162.

Angkatan Darat yang dijemput paksa oleh kelompok G30S. Akhirnya ditemukan sebuah rumah kecil di Lubang Buaya, berikut sebuah sumur tua yang tertimbun tanah. Muncul bau tidak sedap dari dalam sumur tua itu dan diputuskan untuk dilakukan penggalian pada keesokan harinya.

Ternyata benar bahwa korban tragedi G30S ditimbun dalam sumur tua itu. Dengan bantuan Pasukan Pengintai Amfibi, penggalian sumur untuk mengeluarkan jenazah enam jenderal dan seorang perwira Angkatan Darat itu dilakukan. Setelah jenazah enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat itu ditemukan, Presiden Sukarno langsung menetapkan untuk menaikkan pangkat mereka satu tingkat, dan memberikan mereka gelar Pahlawan Revolusi. Pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para Pahlawan Revolusi itu akhirnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sore harinya, Presiden Sukarno pun datang berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan menaburkan bunga di makam ketujuh Pahlawan Revolusi tersebut.<sup>65</sup>

Mulai tanggal 6 Oktober 1965, situasi sudah tidak terkendali. Walaupun belum ditemukan bukti-bukti yang memadai, tetapi PKI sudah dituduh sebagai penanggung jawab tunggal Gerakan 30 September yang mengakibatkan kematian enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat tersebut. Akibatnya, tuntutan kepada Sukarno untuk membubarkan PKI berikut organisasi-organisasi massanya mulai marak di mana-mana. Bukan hanya itu, anggota PKI serta simpatisannya mulai diburu.<sup>66</sup>

Melihat perkembangan yang tidak terkendali itu, Sukarno pun melakukan usaha guna meredakan situasi yang sedang panas. Dapat dilihat dalam pidatonya ketika

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

Sidang Paripurna Kabinet Dwikora yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1965 di Istana Bogor berikut ini:

Apa pun juga yang terjadi janganlah kita mau diadudombakan dengan dikemudikan oleh perasaan dendam. Berikan saja ketenangan dan janganlah terseret oleh tuduhan-tuduhan. Insafilah karena saya mencari penyelesaian politik yang adil demi keselamatan Revolusi Indonesia.

Saya tidak membenarkan pembunuhan buas yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, dan saya mengutuknya.

Agar adanya peristiwa tersebut janganlah sampai melemahkan kesatuan dan persatuan Bangsa, sehingga mengundang Nekolim masuk ke Indonesia sebagaimana yang sudah mereka rencanakan.<sup>67</sup>

Namun, permintaan Sukarno itu hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Tuntutan kepada Sukarno untuk membubarkan PKI semakin menghebat. Pada tanggal 8 Oktober 1965, massa mendatangi kantor PKI dan dibakar. Tindakan kekerasan terhadap PKI terus berlanjut. Pimpinan, tokoh, anggota, dan bahkan simpatisan PKI di berbagai wilayah mulai diburu dan dibantai.<sup>68</sup>

Kekurangyakinan bahwa PKI adalah penanggung jawab utama G30S menjadikan Sukarno tidak mau memenuhi tuntutan berbagai kalangan untuk membubarkan PKI. Sebaliknya, janji Sukarno untuk mencari penyelesaian politik yang adil demi keselamatan Revolusi Indonesia pun tidak kunjung datang.

Sukarno memang menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kriminal yang mengakibatkan gugurnya pahlawan revolusi dan korban lain yang tak berdosa. Komentarnya, itu hal yang bisa terjadi dalam revolusi. Peristiwa 1 Oktober 1965 hanyalah riak kecil dalam gelombang yang besar. Ia menolak tuduhan bahwa PKI terlibat. Ia pun kemudian membentuk Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) untuk mengadili tokoh-tokoh yang bersalah tetapi tidak mau mengutuk PKI. Bahkan Presiden Sukarno terus menerus mempropagandakan Nasakom. Ini oleh rakyat banyak diartikan

---

<sup>67</sup> Budi Setyono dan Bonnie Triyana (Penyt.), *op. cit.*, hlm. 341.

<sup>68</sup> Tidak ada angka pasti mengenai berapa persis korban pembantaian terhadap PKI yang berlangsung pada tahun 1965-1966 itu, tetapi diperkirakan angkanya mencapai ratusan ribu orang. Lihat Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 146.

sebagai membela PKI, karena itu popularitas Presiden Sukarno dari hari ke hari semakin menurun.<sup>69</sup>

Reaksi rakyat yang tidak puas tersebut banyak ditunjukkan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan melakukan aksi demonstrasi massal, penyerbuan terhadap gedung-gedung dan kantor-kantor milik PKI, pengrusakan dan pembakaran gambar-gambar lambang PKI.<sup>70</sup> Ini semua menunjukkan bahwa rakyat begitu menaruh perhatian yang besar terhadap peristiwa G30S, tentu saja dengan mengecam peristiwa tersebut sebagai pemberontakan yang dapat menggoncangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan PKI-lah yang harus bertanggung jawab atas semua itu. Apalagi setelah Sukarno tidak mengambil tindakan yang tegas, semakin membuat popularitas Sukarno turun.

Para pemuda dan mahasiswa pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 25 Oktober 1965, para mahasiswa mendirikan kesatuan-kesatuan aksi yang bermarkas di Universitas Indonesia, Jakarta. Wadah kesatuan aksi tersebut bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mereka tidak sabar lagi melihat dan merasakan situasi politik dan ekonomi yang semakin kacau. Selain KAMI, bermunculan pula kesatuan aksi lainnya seperti KAPPI (pemuda dan pelajar), KAWI (wanita), KASI (sarjana), KAGI (guru), dan KABI (buruh). Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila melancarkan unjuk rasa di halaman gedung DPR-GR dan mengajukan tiga buah tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu:<sup>71</sup>

1. Pembubaran PKI
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S

---

<sup>69</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 144.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>71</sup> James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 182.

### 3. Penurunan harga / perbaikan ekonomi

Semakin hari mereka semakin giat melakukan aksi demonstrasi. Pemerintah sendiri bukannya segera mengatasi keadaan yang kacau, malah justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Tindakan tersebut antara lain pada tanggal 24 Februari 1966, Presiden Sukarno merombak Kabinet Dwikora menjadi Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Jumlah menteri dalam kabinet menjadi 100 orang. Akan tetapi, justru dalam kabinet itu banyak anggota kabinet yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S. Tentu saja perubahan kabinet tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat, terutama para mahasiswa karena susunan menteri-menteri dalam kabinet tersebut dipandang jauh dari harapan rakyat dan bertentangan dengan Tritura, oleh karena masuknya tokoh-tokoh yang dicurigai terlibat di dalam peristiwa G30S, diangkat dan didudukkan kembali sebagai menteri dalam kabinet.<sup>72</sup>

Apalagi Jendral Nasution, yang anti komunis dan anaknya yang terbunuh dalam tragedi G30S, disingkirkan dari kabinet. Kemudian beberapa orang yang diindikasikan PKI atau pro PKI justru dimasukkan ke dalam kabinet, antara lain Sumarjo sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Letnan Kolonel Syafei sebagai Menteri Negara.<sup>73</sup>

Pada hari pelantikan “Kabinet Dwikora yang Disempurnakan”, jalan-jalan dipenuhi oleh para demonstran. Gusarnya mahasiswa menjadikan situasi semakin panas dan gerakan massa yang dipelopori para mahasiswa semakin menghebat. Pendukung Sukarno juga memberi tanggapan terhadap aksi demonstrasi itu dengan sikap keras yang ditunjukkan oleh Subandrio dengan membentuk Barisan Sukarno yang terdiri dari

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>73</sup> G. Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 145.

para buruh tani terutama para pemuda, sebagai lawan bagi mereka yang berani 'mendongkel' presiden. Akan tetapi, pembentukan Barisan Sukarno ini tidak mendapat dukungan dari pimpinan-pimpinan ABRI khususnya Angkatan Darat (AD). Tindakan KAMI ternyata menimbulkan kemarahan besar bagi presiden sehingga pada tanggal 26 Februari 1966, Sukarno bukannya membubarkan PKI malah justru KAMI yang dibubarkan.<sup>74</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno tidak dapat mengambil tindakan yang tegas di dalam rangka penyelesaian G30S. Rakyat pun semakin meragukan kepemimpinan Sukarno sebagai presiden dan dari sinilah, secara perlahan, kepemimpinan Sukarno mulai berakhir.

### 3. Dalang Tragedi

Menurut versi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto, tragedi ini didalangi oleh PKI<sup>75</sup> sebagai satu-satunya dalang. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut G30S/PKI dengan tekanan pada PKI-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Hal ini yang pantas dicermati, seperti diketahui PKI adalah organisasi sipil. Sementara itu tokoh-tokoh kunci dalam gerakan yang menamakan diri sebagai Gerakan Tiga puluh September (G30S) itu – yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo<sup>76</sup> adalah justru personil-personil militer, khususnya dari kesatuan TNI Angkatan Darat. Perlu diingat pula bahwa Angkatan Darat sejak 1955 telah makin sengit berlawanan dengan PKI. Penyebabnya antara lain, adalah tingginya perolehan suara PKI sementara, dalam pemilu tersebut

<sup>74</sup> Ibid., hlm. 146.

<sup>75</sup> Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1984, hlm. 64.

<sup>76</sup> Baskarara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 166.

perolehan partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yakni partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat, amat kecil.<sup>77</sup>

Selanjutnya yang menjadi kejanggalannya adalah sedemikian hebatkah PKI sehingga meskipun merupakan organisasi sipil, ia telah berhasil mempengaruhi para perwira Angkatan Darat ini sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk melawan kesatuannya sendiri. Sangat kecil sekali kemungkinannya, jika PKI yang dituduh menjadi dalangnya.

Antonie C. A. Dake, seorang sarjana sejarah, kelahiran tahun 1929 di Amsterdam, Belanda, dalam bukunya yang berjudul 'Soekarno File, Berkas-berkas Soekarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan' menyimpulkan bahwa Sukarno adalah dalang G30S. Antonie Dake menulis: "...presiden pertama Indonesia itu merupakan biang yang sebenarnya dari apa yang terjadi pada paruh akhir tahun 1965".<sup>78</sup>

Sangat disayangkan kesimpulan Dake tersebut diberikan dengan menampik segala kemungkinan lainnya. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan kedudukannya sebagai Presiden Seumur Hidup/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada periode tahun 1959-1965 di mana kekuasaan berada di tangan Bung Karno sepenuhnya, maka untuk 'menyingkirkan' perwira-perwira tinggi, baik di jajaran Angkatan Darat maupun lainnya, dia dapat melakukannya dengan tidak perlu mengadakan tindakan misterius, apalagi membuat sebuah gerakan.

Selanjutnya, Gerakan 30 September 1965 adalah gerakan yang dengan dalih melindungi Presiden Sukarno dari *coup* yang akan dilakukan Dewan Jenderal terhadap Bung Karno, dengan membentuk Dewan Revolusi dan mendemisionerkan Kabinet/Pemerintahan Presiden Sukarno. Sebenarnya hal tersebut telah dapat dianggap

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>78</sup> Antonie C.A. Dake, *Sukarno File, Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*, Jakarta, Aksara Karunia, 2005, hlm. 4.

sebagai tindakan meng-*coup* Pemerintahan RI yang sah di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Bila Bung Karno dituduh dalangnya atau terlibat dalam G30S, untuk apa Bung Karno meng-*coup* dirinya sendiri?<sup>79</sup>

Selain itu, di dalam memimpin perjuangan bangsa Indonesia, Bung Karno dikenal sebagai pemimpin yang selalu berusaha mempersatukan semua elemen bangsa mencapai kemerdekaan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bung Karno menghindari tindakan yang bisa memecah belah bangsa dan hanya menggunakan tindakan-tindakan yang sesuai hukum yang berlaku dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.<sup>80</sup> Sungguh sangat tidak berdasar sekali apa yang diutarakan oleh Antonio Dake yang mengungkapkan bahwa Sukarno adalah dalang dari tragedi.

Ketidakterlibatan Sukarno dalam tragedi G30S juga semakin dipertegas oleh Bambang Siswoyo yang mengungkapkan petunjuk yang mengindikasikan bahwa Bung Karno tidak terlibat, yaitu Bung Karno tidak pernah dihubungi PKI dan tidak pernah ada pembicaraan antara PKI dengan Bung Karno untuk mencetuskan G30S tersebut. Selain itu, Bung Karno tidak terlibat dan tidak tahu sebelumnya rencana penculikan apalagi pembunuhan para jenderal. Hal ini terlihat dari keterkejutan Bung Karno dan kebingungan Bung Karno waktu mendengar berita penculikan jenderal-jenderal sehingga tercetus ucapan “Saya sangat terkejut. Hal itu benar-benar tidak pernah saya bayangkan”<sup>81</sup>

Lalu bagaimana dengan dugaan Soeharto yang berada di balik tragedi? Dalam pledoinya, Kolonel Abdul Latief – Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya dan salah seorang tokoh kunci G30S – mengatakan bahwa sebelum dilaksanakan

---

<sup>79</sup> Burhan Azis dan A. Supardi “Ngapain Bung Karno Meng-Coup Dirinya Sendiri – Membantah Imajinasi Antonie CA Dake tentang Dalang G30S” (online), 2005, hal. 1 (diakses dari [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) – 26 Maret 2006 pukul 19.54).

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>81</sup> Bambang Siswoyo, *Menelusuri Peran Bung Karno dalam G30S*, Jakarta, Mayasari, 1989, hlm. 122.

operasi militer itu, pada 30 September 1965 sore, dia telah melapor ke Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto. Dikatakan bahwa Soeharto juga telah mengetahui rencana *move* militer itu melalui salah seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagiyo, yang menemuinya pada 28 September 1965.<sup>82</sup> Lalu yang menjadi kejanggalannya adalah mengapa Pangkostrad Soeharto tidak melaporkan rencana operasi militer itu kepada atasannya, yakni Jenderal Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat atau kepada Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi? Padahal, ia tahu bahwa operasi militer itu adalah operasi besar dan serius, dan direncanakan akan berlangsung di ibukota negara.

Pada waktu terjadinya tragedi tersebut, Soeharto mengaku sedang berada di Rumah Sakit Gatot Soebroto, menengok anaknya, Tommy, ketika itu masih berumur empat tahun yang dirawat karena tersiram air sup panas. Baru pada keesokan paginya, ia mendengar bahwa ada peristiwa penculikan atas beberapa perwira Angkatan Darat. Kepada Letkol Sadjiman, dia sempat berkata bahwa dirinya sudah mendengar tentang adanya penculikan terhadap Pak Nasution dan Jenderal A. Yani. Setelah itu tanpa pengawasan, ia menuju Kostrad.<sup>83</sup> Yang perlu menjadi perhatian adalah dari mana Soeharto mengetahui nama-nama dari para jenderal yang diculik, padahal ia hanya mendapatkan laporan tentang penculikan, tanpa menyebutkan nama. Kemudian dengan tenang dan sendirian ia menuju ke Kostrad, sangat meragukan jika seorang perwira tinggi tidak mendapat pengawasan ketika akan mengusut pasukan yang tidak dikenal.

Pada waktu itu juga, salah satu posisi paling penting dalam angkatan bersenjata di Indonesia adalah posisi Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang waktu itu dijabat oleh Mayjen Soeharto. Lalu, kalau G30S itu adalah

---

<sup>82</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 167.

<sup>83</sup> Soeharto, *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K. H.*, Jakarta, Citra Lamtoro Gung Persada, 1989, hlm. 118.

gerakan PKI untuk melawan Angkatan Darat, mengapa Soeharto sebagai Pangkostrad tidak turut menjadi korban? Menurut Baskara T. Wardaya, “kemungkinannya adalah telah ada sikap saling pengertian antara para pelaku G30S dengan Soeharto, atau bahkan Soeharto sendiri yang merupakan bagian dari G30S itu.”<sup>84</sup>

Perlu diketahui pula bahwa ketika pembunuhan-pembunuhan massal terhadap orang-orang yang tidak tahu menahu tentang seluk beluk G30S di berbagai daerah di seluruh Indonesia, kekuasaan riil pada waktu itu berada di tangan Mayor Jenderal Soeharto. Sebaliknya, di samping tidak membenarkan dan mengutuk pembunuhan yang dilakukan Gerakan 30 September, Presiden Sukarno juga menentang keras berbagai pembunuhan terhadap orang komunis dan non-komunis setelah terjadinya peristiwa G30S. Diserukan oleh Presiden Sukarno agar menciptakan suasana tenang dan jangan ada dendam karena perbuatan tersebut hanya akan menghancurkan Indonesia sendiri.<sup>85</sup> Maka semakin jelas pulalah peranan Soeharto dalam tragedi terbunuhnya enam jenderal sampai kepada pembantaian massal yang terjadi setelah itu.

Terlepas dari siapa yang salah dan yang benar dari tragedi tersebut, peristiwa itu telah mengingatkan kita bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pernah terjadi pembantaian dalam jumlah yang amat besar. Oleh karena itu, sangatlah perlu tragedi tersebut untuk terus dipelajari dan diteliti agar tindakan yang tidak berperikemanusiaan itu tidak akan terulang lagi di masa depan.

---

<sup>84</sup> Burhan Azis dan A. Supardi, *op. cit.*, hlm. 168.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

### BAB III

#### PROSES BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN SUKARNO

Peristiwa penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari yang dikenal dengan nama G30S, sampai saat ini masih meninggalkan banyak pertanyaan. Kalaupun ada yang pasti dari peristiwa pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, yang mengakibatkan terbunuhnya enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat, adalah berubahnya perjalanan hidup Presiden Sukarno. Sejak peristiwa G30S, secara perlahan tapi pasti Sukarno mulai surut ke belakang, dan pada akhirnya terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto.

##### A. Soeharto mulai Muncul

Mulai tanggal 1 Oktober 1965, Sukarno bukan lagi merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi di Indonesia. Sejak hari itu, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto secara bertahap mulai membangun kekuatan tandingan. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Sukarno memanggil Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dani, Men/Pangal Laksdya Laut RE Martadinata, dan Men/Pangak Brigjen (Pol) Sutjipto Judodihardjo, serta Mayjen Pranoto Reksosamodra, Mayjen Soeharto, dan Mayjen Mursjid ke Istana Bogor, dengan maksud akan mengukuhkan penunjukan Mayjen Pranoto Reksosamodra sebagai *caretaker* Men/Pangad. Kepada Presiden Sukarno, Mayjen Soeharto menjelaskan, untuk menghindari terjadinya kekosongan pimpinan, ia mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Ia menambahkan, biasanya kalau Men/Pangad Letjen Ahmad Yani berhalangan, maka pimpinan Angkatan Darat selalu diserahkan kepada Panglima Kostrad. Namun dalam pertemuan itu, Mayjen Soeharto sempat ngotot dengan mengemukakan, Angkatan Darat tidak akan menerima penunjukan Mayjen Pranoto Reksosamodra sebagai pelaksana harian Men/Pangad. Sebagai alasan, Mayjen

Soeharto mengemukakan, keputusan itu diambilnya bukan karena dirinya berambisi menduduki jabatan tersebut, melainkan untuk menghindari dualisme dalam kepemimpinan Angkatan Darat.<sup>86</sup>

Seharusnya Mayjen Soeharto tidak perlu bersikap seperti itu, jika ia sungguh-sungguh tidak berambisi untuk menduduki jabatan tersebut, maka ia harusnya menerima dengan lapang dada penunjukan Mayjen Pranoto Reksosamodra sebagai pelaksana harian Men/Pangad dan sebagai Panglima Kostrad, ia dapat mendukung Mayjen Pranoto Reksosamodro untuk mengembalikan situasi keamanan dan ketertiban.

Akhirnya Presiden Sukarno pun langsung surut ke belakang. Mengingat bagaimanapun, sejak tanggal 1 Oktober 1965, Mayjen Soehartolah yang secara *de facto* menguasai kendali atas Angkatan Darat. Dicapailah kompromi, Presiden Sukarno memegang pimpinan Angkatan Darat, Mayjen Pranoto Reksosamodro menjadi pelaksana harian Men/Pangad, dan Mayjen Soeharto bertanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan. Namun dalam kenyataannya, walaupun Mayjen Pranoto Reksosamodro merupakan pelaksana harian Men/Pangad, tetapi Mayjen Soehartolah yang menguasai Angkatan Darat. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan, Mayjen Soeharto memegang sepenuhnya kendali atas pasukan-pasukan Angkatan Darat.<sup>87</sup>

Bukan itu saja, Mayjen Soeharto yang mendapatkan wewenang dari Presiden Sukarno untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan setelah peristiwa G30S, membersihkan Angkatan Darat dari orang-orang yang dianggap terlibat dalam G30S. Pada tanggal 14 Oktober 1965, akhirnya Presiden Sukarno terpaksa memberhentikan Mayjen Reksosamodra dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian Men/Pangad karena

<sup>86</sup> James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 145.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

diindikasikan terlibat dalam G30S, dengan diberhentikannya Mayjen Pranoto Reksosamodra, Sukarno tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengangkat Mayjen Soeharto menjadi Men/Pangad, menggantikan almarhum Ahmad Yani yang gugur sebagai korban G30S.<sup>88</sup>

Presiden Sukarno pun sebenarnya juga melakukan semacam bentuk peringatan kepada Soeharto terhadap tindakannya yang *ngeyel* itu. Ini dapat dilihat dalam pidato Sukarno pada tanggal 20 November 1965 di depan keempat panglima Angkatan di Istana Bogor, Bung Karno mengatakan: "Ada perwira yang bergudul. Bergudul itu apa? Hei, Bung apa itu bergudul? Ya, kepala batu. Saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Soebandrio. Bukan Leimena. Bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto."<sup>89</sup>

Berbeda dengan nama tokoh lain, Soeharto disebutkan dua kali dan secara berturut-turut. Tampak jelas bahwa Sukarno ingin memberi penegasan dan peringatan kepada Soeharto.

## **B. Munculnya Supersemar**

Malam tanggal 11 Maret 1966, pukul 19.30 WIB, saat Sukarno sedang makan malam, Andi M. Jusuf, Basuki Rahmat, dan Amir Machmud datang ke Bogor. Mereka meminta agar Bung Karno segera menandatangani sebuah surat yang menyangkut keamanan negara, berikut Sukarno dan keluarga. Sukarno sempat bingung dengan surat yang dia sendiri tidak paham isinya. Ia mencoba meminta pertimbangan pada ketiga utusan.<sup>90</sup>

Sukarno merasa bingung dengan keberadaan surat tersebut, terlebih dengan munculnya ancaman, jika surat itu tidak ditandatangani, habislah rakyat Indonesia.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>89</sup> Budi Setyono dan Bonnie Triyana (Peny.), *op. cit.*, hlm. 441.

<sup>90</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 28.

Sukarno merasa tertekan dan berpikir keras, semua mata tertuju pada Sukarno. Sementara itu, dengan ragu-ragu, tangan Sukarno bergerak mengambil pena. Dengan perasaan yang diliputi ketegangan, perlahan ia membubuhkan tanda tangan. Dada yang bergejolak melihat gelagat Sukarno seraya mengendor, semua menarik nafas panjang, hati mereka bicara dengan degup pikiran masing-masing. Surat itu akhirnya ditandatangani oleh Sukarno.<sup>91</sup>

Di kemudian hari, surat itu memang menuai banyak perdebatan. Umumnya perdebatan berkisar pada keaslian surat yang beredar kemudian dan kondisi psikologis Sukarno saat menandatangani surat tersebut.

Perdebatan lain yang berkembang dapat dilihat melalui kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (Lettu) Sukardjo Wilardjito. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir Jenderal (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar, Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD serta Brigjen M. Panggabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Sukarno dan memaksa agar Presiden Sukarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Sukarno memerintahkan Sukardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutny, presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Sukarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Sukardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah Supersemar itu, Jenderal (Purn) M. Jusuf, serta Jenderal (Purn) M. Panggabean membantah peristiwa itu.<sup>92</sup>

M. Jusuf mengungkapkan bahwa selama mereka menghadap Bung Karno, suasana yang terjadi adalah perundingan dengan dasar dan argumentasi yang masuk akal. Jadi memang tidak ada unsur paksaan, apalagi sampai kepada penodongan senjata.<sup>93</sup>

Mengenai hal ini, P.J. Suwarno memiliki pandangan bahwa kemungkinan para jenderal itu datang dua kali ke Istana Bogor, pertama tiga orang dan kedua empat orang. Pertama dilakukan pada sore hari oleh tiga jenderal untuk menggertak Presiden yang diistilahkan Amir Machmud dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua pada malam hari yang memaksa Presiden untuk menandatangani surat yang dibuat di Jakarta, oleh empat orang termasuk di dalamnya Panggabean. Peran Panggabean semakin jelas ketika dia mengetahui keberangkatan para jenderal ke Bogor. Kemudian sekembalinya para jenderal dari Bogor, dia berada bersama Soeharto. Bahkan dialah yang disertai mengurus tindak lanjutnya yaitu membuat surat pembubaran PKI. Terlepas dari masih banyaknya perdebatan yang timbul, yang jelas adalah bahwa Presiden Sukarno berada dalam keadaan terpaksa untuk menandatangani Surat Perintah tersebut.<sup>94</sup>

Hal ini semakin dipertegas oleh kesaksian Hartini yang mengungkapkan bahwa Bung Karno tidak langsung menandatangani surat tersebut, namun masuk kamar

---

<sup>92</sup> "Supersemar" (online), 2006, hlm. 3 (diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Supersemar> - 29 September 2006, pukul. 18.05).

<sup>93</sup> A. Pambudi, *op. cit.*, hlm. 151.

<sup>94</sup> P. J. Suwarno, *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 116.

terlebih dahulu sampai tiga jam. Ketika keluar dari kamar, Bung Karno akhirnya menandatangani surat perintah itu dengan lebih dulu mengucapkan: “*Bismillah irrahman irrahim.*” Bahwa para jenderal datang ke Bogor sudah membawa Surat Perintah, sedangkan presiden dipaksa untuk menandatangani seperti yang dikatakan oleh Wilardjito tampak pada peringatan Sabur kepada Bung Karno bahwa surat semacam itu, dapat dikatakan secara administratif kurang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>95</sup>

Meski sadar konsekuensi yang akan diterima, Sukarno tetap memilih menandatangani surat itu. Sejak saat itu pula, Sukarno memilih bungkam dari politik. Kepada Mohammad Said, Pimpinan Taman Siswa Jakarta, yang pernah diangkatnya menjadi seorang menteri, Sukarno sempat mengatakan, “Dengan satu syarat tangan saja, saya dapat membuat mereka bergerak untuk membelaku. Tetapi saya tidak mau timbul pertumpahan darah di antara rakyatku. Biarlah saya mundur.” Tanpa nyana, surat tersebut dinilai banyak pihak hanya merupakan jebakan politik untuk mendepak Sukarno. Terbukti, kekuasaan Sukarno dengan mudah dimanfaatkan oleh Suharto.<sup>96</sup>

Kepada Hartini, salah satu istrinya pada waktu itu, Sukarno mengatakan bahwa dirinya telah kalah. Pernyataan itu diawali ketika dalam pembicaraan intim, Hartini dengan hati-hati menanyakan, “Pak, apa Bapak masih jadi Presiden?”. Lebih lanjut Hartini menuturkan, “Bapak tidak menjawab. Ia hanya mengatakan, ‘Saya hanya teken Surat Perintah 11 Maret. Isinya pengamanan saya serahkan kepada Soeharto. Mestinya kalau sudah aman, kekuasaan dikembalikan. Tapi ia main patgulipat.’ Dia sendiri jadi presiden dan Bapak kalah.” Surat tersebut menjadi kuasa sekelompok kepentingan atas

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>96</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 31.

nama pembubaran PKI yang secara resmi dilakukan pada 12 Maret 1966, sehari setelah surat itu ditandatangani Sukarno.<sup>97</sup>

Dalam keterangan lain, menurut Solichin Salam, Supersemar menjadi senjata Soeharto untuk mengendalikan keadaan.<sup>98</sup> Tidak lama kemudian, Soeharto dan jajarannya melakukan pembredelan media massa sehingga yang terbit hanyalah harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang merupakan corong mereka guna menciptakan opini luas dan memonopoli kebenaran versi. Mengingat situasi konflik juga belum teratasi, maka dipandang perlu mengadakan Sidang Istimewa MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Dalam Sidang Istimewa MPRS tersebut, Supersemar makin diteguhkan. MPRS juga mencabut gelar Presiden Seumur Hidup, mengoreksi gelar Pemimpin Besar Revolusi maupun produk-produk MPRS yang terdahulu yang dipandang tidak sesuai karena menyimpang dari jiwa serta semangat UUD 1945.<sup>99</sup>

Kekalahan sudah di depan mata. Sukarno sudah merasa berdiri di atas bara api yang menyala-nyala, terlebih ketika mendengar kata 'surat perintah' yang telah ditandatangani Maret lalu. Pada suatu ketika Sukarno mengungkapkan kegelisahan hatinya dengan mengatakan, "Saudara tidak merasakan apa yang saya rasakan." Mencoba menguatkan diri, ketika melantik Kabinet Ampera, 28 Juli 1966, Sukarno kembali mengatakan bahwa Supersemar bukanlah penyerahan kekuasaan. Dengan geram ia berucap, "*I repeat again, it is not a transfer of authority.*"<sup>100</sup> (Saya ulangi lagi, ini bukanlah perpindahan kekuasaan).

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>98</sup> Solichin Salam, *op. cit.*, 283.

<sup>99</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

Hingga kini, surat asli belum ditemukan. Ini menunjukkan tipisnya kesadaran akan pentingnya dokumen sejarah atau arsip, termasuk di kalangan pejabat negara. Ini juga menunjukkan ketidakrapian sistem administrasi pemerintahan. Namun demikian, berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, saksi terakhir hingga akhir hayatnya (8 September 2004), agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu (2004) menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saefudin, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto.<sup>101</sup> Namun, pada tahun 2008 beliau telah meninggal dunia.

Supersemar sendiri juga digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Bung Karno, memulangkan pasukan Cakrabirawa yang setia kepada Presiden Sukarno, mengawasi berita ekonomi dan politik yang ada di TVRI, RRI, dan media lain. Dalam konteks ini, perintah untuk mengamankan situasi, termasuk mengamankan Presiden Sukarno, disalahgunakan untuk keperluan lain oleh penerima perintah.<sup>102</sup>

Selepas Supersemar, jalan hidup Sukarno demikian berubah. Walaupun usaha untuk mempertahankan kedudukan masih ada, tapi Sukarno kelihatannya sudah mulai enggan dan letih. Sukarno yang sudah letih berpikir. Ia mengatakan, “Biarlah aku lepaskan jabatan kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan Nekolim”<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> “Supersemar”, *op. cit.*, hlm.4.

<sup>102</sup> Asvi Warman Adam, *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*, Jakarta, Gramedia, 2009, hlm. 124.

<sup>103</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 34.

Di tengah kebimbangan hatinya, Sukarno berpikir panjang tentang masa depan bangsa, rakyat Indonesia yang berpuluh tahun digemblengnya. Ia sadar dengan posisinya yang tidak mungkin lagi dapat kembali seperti semula. Beragam jebakan politik dan tekanan telah membuatnya guncang. Tak ada lagi yang dapat ia lakukan selain menyelamatkan bangsa dari teror nekolim yang sedari awal mengincar. Sepertinya Sukarno sudah bisa memprediksi keadaan, nyawa melayang akan semakin banyak. Bagi Sukarno, ini lebih dari sekedar kekalahan, tetapi kehancuran Indonesia. Seiring waktu dengan perkembangan politik yang makin panas, Sukarno tak bisa berbohong. Makin lama, fisiknya melemah, demikian suaranya makin lirih. Sukarno merasa capek menjadi 'musafir politik'. Tiga puluh delapan tahun ia berkelana di 'medan perjuangan' – sejak mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), 4 Juli 1927 hingga tahun 1965, 'asam garam' kehidupan politik telah dirasakannya. Ia mencoba tersenyum, tapi tetap tidak bisa menghilangkan kepedihan batinnya.<sup>104</sup>

### C. Nawaksara

Jalan panjang menuju kejatuhan itu akhirnya berujung pada Nawaksara. Pidato Nawaksara yang dibacakan oleh Sukarno pada 22 Juni 1966 dinilai MPRS tidak bisa memberi pertanggungjawaban.

Nawaksara adalah laporan pertanggungjawaban yang dituangkan dalam bentuk pidato oleh Presiden Sukarno di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada tanggal 22 Juni 1966. Lalu kenapa diberi nama Nawaksara? Pidato tersebut berisi sembilan pokok atau sembilan hal yang menjadi inti dari pidato beliau. Bung Karno pun menamai Nawaksara dengan alasan :

Sembilan di dalam bahasa Sanskrit adalah "Nawa". Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, enam-yam, tujuh-sapta, delapan-hasta, sembilan-nawa, sepuluh-dasa. Jadi saya mau beri nama dengan perkataan "Nawa". "Nawa" apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

"NAWA AKSARA", dus "NAWA AKSARA" atau kalau mau disingkat "NAWAKSARA". Tadinya ada orang yang mengusulkan diberi nama "Sembilan Ucapan Presiden". "NAWA SABDA". Nanti kalau saya kasih nama Nawa Sabda, ada saja yang salah-salah berkata: "Uh, uh, Presiden bersabda". Sabda itu seperti raja bersabda. Tidak, saya tidak mau memakai perkataan "sabda" itu, saya mau memakai perkataan "Aksara"; bukan dalam arti tulisan, jadi ada aksara latin, ada aksara Belanda dan sebagainya. NAWA AKSARA atau NAWAKSARA, itu judul yang saya berikan kepada pidato ini. Saya minta wartawan-wartawan mengumumkan hal ini, bahwa pidato Presiden dinamakan oleh Presiden, Nawaksara<sup>105</sup>

Dari situ dapat jelas dilihat bahwa Nawaksara itu diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Nawa dan Aksara. Nawa artinya sembilan dan Aksara artinya angka atau poin, cocok dengan jumlah dari sembilan hal yang menjadi inti pidato Nawaksara. Sembilan hal tersebut yaitu mengenai: retrospeksi, landasan kerja melanjutkan pembangunan, hubungan politik dan ekonomi, detail ke-DPR, tetap demokrasi dipimpin, merintis jalan ke arah pemurnian pelaksanaan UUD 1945, wewenang MPR dan MPRS, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, serta penutup.<sup>106</sup>

Pidato Nawaksara yang dibacakan oleh Sukarno tersebut, dinilai MPRS dan jajarannya tidak bisa memberi pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Pidato tersebut dinilai hanya sebagai laporan perkembangan saja (*progress report*), bukan pertanggungjawaban presiden mengenai kondisi pasca G30S.

Nasution, yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua MPRS mengungkapkan alasan penolakan Nawaksara, dalam wawancaranya dengan majalah *D & R* yang dipandu oleh Tiarna Siboro:

Pidato presiden tanggal 22 Juni 1966 pada Sidang Umum IV/MPRS itu disebutnya sebagai *Progress Report* dengan judul NAWKSARA, karena berisi sembilan pokok. Menurut penilaian waktu itu, amanat tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu *progress report* atau pertanggungjawaban, karena, *pertama*, materi amanat itu pada hakikatnya tidak memberikan pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS. Seharusnya sesuai dengan kedudukan presiden terhadap MPRS, maka presiden harus memberikan

<sup>105</sup>Analisa dan Peristiwa "Pidato Presiden Soekarno Nawaksara" (online), 1997, hlm. 7 (diakses dari [www.temppointeraktif.com](http://www.temppointeraktif.com) – 26 Maret 2006 pkl. 19.35).

<sup>106</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

pertanggungjawaban hasil kerjanya kepada MPRS. *Kedua*, isi amanat itu pada umumnya berisi saran-saran kepada MPRS dalam bidang poleksos (politik, ekonomi, sosial) di mana presiden menghendaki agar MPRS mempertahankan saja keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan MPRS yang sebenarnya menyimpang dari UUD 1945, misalnya penetapan presiden seumur hidup.<sup>107</sup>

MPRS pun akhirnya meminta Presiden Sukarno untuk melengkapi pidato

Nawaksara-nya. Termasuk pula tanggapan Sukarno terhadap G30S, MPRS merasa

bahwa Sukarno sebagai presiden perlu dimintai tanggapannya terhadap peristiwa itu.

Dalam Pelengkap Nawaksara, Sukarno dengan jelas mengutuk keras peristiwa G30S.

Di sini ia lebih sering menggunakan istilah Gestok atau Gerakan Satu Oktober, karena

menurutnya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965, pagi-pagi sekali

menjelang subuh. “Sudah terang, Gestok kita kutuk! Dan saya, saya mengutuknya

pula!”<sup>108</sup>

Demikian pernyataan Soekarno. Begitu keras begitu lantang. Dari situ jelas dapat dilihat bahwa Soekarno sangat menentang keras peristiwa yang meminta enam nyawa jenderal dan ajudannya.

Dalam pelengkap pidato Nawaksara, ia pun mengungkapkan bahwa terdapat kekacauan dalam tubuh PKI. “Penyelidikanku yang seksama menunjukkan bahwa peristiwa G30S itu ditimbulkan oleh ‘pertemuannya’ tiga sebab, yaitu: a) keblingeran pimpinan PKI, b) kelihaian subversi Nekolim, c) memang adanya oknum-oknum yang ‘tidak benar’ “<sup>109</sup>

Dari pernyataannya tersebut, ia mengakui bahwa pimpinan PKI keblingeran.

Artinya memang ada yang tidak beres dalam tubuh PKI sendiri. Tetapi kenyataan

sekarang mulai berkembang, PKI sebenarnya hanya dijadikan kambing hitam oleh

pihak-pihak tertentu sebagai dalang dari peristiwa tersebut.

<sup>107</sup> Tiarna Siboro, Wawancara Majalah *D&R*, 17 Januari 1998 (online), hlm. 1 (diakses dari [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) – 26 Maret 2006 pkl. 19.41).

<sup>108</sup> Budi Setyono dan Bonnie Triyana (Penyt.), *op. cit.*, hlm. 719.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 720

Tentang subversi nekolim, perlu ditekankan bahwa nekolim adalah akronim dari Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Bung Karno menekankan kewaspadaan terhadap bahaya kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri dan bahaya kekuatan subversif kontrarevolusioner dari luar negeri. Kejadian-kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri (yaitu oknum-oknum yang ‘tidak benar’) sudah bersatu padu dengan kekuatan subversif kontrarevolusioner dari luar negeri (kelihain subversi nekolim).<sup>110</sup> Artinya Bung Karno tidak menutup kemungkinan bahwa pihak asing memang terlibat dalam peristiwa G30S. Bahan-bahan dan publikasi yang selama ini diterbitkan, khususnya di luar negeri, semakin jelas menyingkap ‘kelihain subversif nekolim’ dalam tragedi 1965.

Satu bahan penting ialah ‘Dokumen CIA – Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965’ yang diterbitkan oleh Hasta Mitra. Bahan ini merupakan kumpulan data intelejen otentik yang dibuka oleh *State Department* Amerika Serikat (AS).<sup>111</sup> Dari bahan-bahan ini dapat disimpulkan bahwa Amerika memberikan nama-nama orang komunis kepada Angkatan Darat Indonesia, yang membunuh paling tidak 105.000 orang komunis pada 1965-1966. CIA tidak bisa lagi menutupi peranannya.

Hal ini semakin ditegaskan oleh Baskara T. Wardaya yang menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat dalam tragedi G30S. Menurutnya, keterlibatan Amerika ini ada kaitannya dengan usaha Amerika untuk membendung pengaruh komunis, termasuk yang berkembang di Indonesia. Oleh sebab itu, ada anggapan PKI hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja. Sebagai bukti dapat dilihat dari dokumen CIA berkategori “*Special Report*” tertanggal 26 Januari 1965, di mana CIA semakin

<sup>110</sup> AS Munandar, “Peranan Nekolim dalam Tragedi 1965” (online), 2005, hlm. 3 (diakses dari [www.kontak.club.fr](http://www.kontak.club.fr) – 26 Maret 2006 pukul 19.37).

<sup>111</sup> *Dokumen CIA, Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*, Jakarta, Hasta Mitra, 2002, hlm. 357.

mengkhawatirkan usaha Sukarno untuk memotong kepentingan AS sambil membuka peluang bagi PKI untuk mengambil alih pemerintahan.<sup>112</sup> Dari situ semakin jelas dapat dilihat bahwa CIA sangat khawatir jika sewaktu-waktu PKI dapat mengambil alih pemerintahan dan itu berarti ideologi komunis yang menjadi ideologi PKI akan dapat semakin berkembang luas.

Hal tersebut juga diperkuat oleh David T. Johnson yang mengungkapkan bahwa ada enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat dalam menghadapi situasi yang memanas di Indonesia pada periode 1965: 1) membiarkan saja; 2) membujuk Sukarno mengubah kebijakan; 3) menyingkirkan Sukarno; 4) mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan 5) merusak kekuatan PKI; dan 6) merencanakan kehancuran PKI sekaligus kejatuhan Sukarno.<sup>113</sup> Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.

Kemudian pernyataan Sukarno mengenai oknum yang tidak benar itu, bisa saja berasal dari Angkatan Darat seperti Soeharto atau AURI sendiri.<sup>114</sup>

Akhirnya Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara dalam kualitasnya sebagai amanat presiden kemudian ditolak oleh MPRS dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Presiden Sukarno telah tidak dapat memenuhi pertanggung jawab konstitusionalnya
2. Presiden Sukarno dinyatakan telah tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS
3. Melarang Presiden Sukarno melakukan kegiatan politik sampai Pemilihan Umum yang akan datang, serta menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno serta segala kekuasaan pemerintah negara yang diatur dalam UUD 1945
4. Mengangkat pengembal TAP MPRS Nomor IX sebagai pejabat presiden berdasarkan pasal 8 UUD 1945 hingga dipilihnya presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum
5. Pejabat presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPRS

<sup>112</sup> Baskara T. Wardaya, *op cit*, hlm. 158.

<sup>113</sup> Asvi Warman Adam, *op. cit.*, hlm. 145.

<sup>114</sup> Burhan Azis dan A. Supardi, *op. cit.*, hlm. 2.

6. Penyelesaian persoalan hukum yang menyangkut Bung Karno dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada pejabat Presiden<sup>115</sup>

Ketetapan ini menarik untuk disimak. Pertama, kalau dianggap bersalah, mengapa Presiden Sukarno dirampas haknya untuk membela diri secara politis melalui sarana demokrasi yaitu Pemilihan Umum atau pembelaan secara hukum melalui pengadilan. Hal itu hanya bisa terjadi pada pemerintahan yang belum mengenal peradaban hukum modern. Kedua, Presiden Sukarno tidak pernah diangkat oleh MPRS tapi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagaimana yang tercantum dalam Aturan Peralihan UUD 1945 pada Pasal III, sehingga hanya presiden yang dipilih MPR dapat diberhentikan oleh MPR, apalagi oleh MPRS. Oleh karena itu, menurut hukum, tindakan MPRS memberhentikan Presiden Sukarno sebagai presiden, adalah inkonstitusional. Ketiga, pelarangan warganegara melakukan kegiatan politik tanpa melalui proses hukum adalah tindakan inkonstitusional, kecuali pada zaman kolonial Belanda dengan adanya hak *exorbitanterechten* (kekuasaan hukum luar biasa) pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.<sup>116</sup> Oleh karena itu, tindakan MPRS melarang kegiatan politik bagi Presiden Soekarno dapat ditegaskan inkonstitusional.

Pelengkap Nawaksara ternyata tidak juga memenuhi harapan rakyat. Setelah membahas surat presiden tersebut, Pimpinan MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Sukarno telah lalai dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Sementara itu, DPR-GR dalam resolusi dan memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 menilai bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Dalam kaitan itu, DPR-GR

<sup>115</sup> Kikin Asikin, "Nawaksara dan Sejumlah Pertanyaan" (online), 1998, hlm. 10 (diakses dari [www.munindo.brd.de](http://www.munindo.brd.de) – 26 Maret 2006 pukul 20.00).

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

meminta kepada MPRS mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Sukarno dari jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden/Mandataris sesuai Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum.<sup>117</sup>

Dengan penolakan Nawaksara berikut pelengkapanya, gagal sudah Sukarno mempertahankan dirinya sebagai Presiden RI, sekaligus Pemimpin Besar Revolusi. Sejak tanggal 20 Februari 1967, sebutan presiden lepas dari dirinya. Hal ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang Supersemar yang kemudian dibacakan pada tanggal 22 Februari 1967 di Istana Merdeka. Pengumuman tersebut, ibarat jarum suntik yang seketika membuat nadi Sukarno berhenti berdenyut. Apalagi yang Sukarno dapat lakukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Setelah pembacaan, Sukarno duduk terkulai, lemah, dan amat sedih. Kepemimpinan Sukarno pun berakhir. Hal ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.<sup>118</sup>

Setelah penyerahan dan pencabutan kekuasaan, hidup Sukarno berubah drastis. Tepukan massa menghilang, dukungan lengang, ia pun terjatuh dalam lubang keterasingan. Bukan hanya penghinaan yang dirasakan, lebih dari itu, Sukarno merasakan kekejaman yang teramat besar dalam hidupnya. Ia merasa gagal membina bangsa Indonesia. Sejak penyerahan kekuasaan, Sukarno tak lagi bisa bergema di podium. Inilah kejadian yang terasa begitu menyakitkan. Sukarno memang tak bisa jauh dari massa. Seruan dan sorak sorai massa saat mendengarkan ia berpidato, menjadi

<sup>117</sup>“Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara” (online), 2000, hlm. 5 (diakses dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) – 26 Maret 2006 pkl. 20.00).

<sup>118</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 53.

musik jiwa yang tak bisa tergantikan. Di sanalah ia bisa hidup sebenar-benarnya. Ia merasa telah menyatu dengan rakyat. Sukarno merasa dimiliki dan dicintai.

Tanpa itu semua, Sukarno menjadi loyo. Tak ada suasana yang paling membahagiakan Sukarno selain dekat dengan rakyat – meski itu hanya lewat suara *mikrophone*. Minimal ia dapat menyalurkan hasrat dan cita-cita revolusinya menjadikan Indonesia negara yang mandiri, lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan mampu sejajar dengan bangsa lain. Sukarno ingin Indonesia dihargai di pentas internasional.

Secara politik, perlakuan terhadap Sukarno ini dirasa berlebihan. Di samping itu, pengangkatan Suharto sebagai pejabat presiden berdasar hasil Sidang Istimewa MPRS dari tanggal 7-12 Maret 1967, juga dinilai tidak konstitusional, karena ada aturan bahwa pengangkatan hanya bisa dilakukan jika presiden mangkat atau sampai habis waktunya. Dengan begitu, berdasarkan kajian konstitusional terhadap Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Keputusan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967), cara ini merupakan puncak dari upaya dalam rangka menjatuhkan Presiden Sukarno. Cara semacam ini juga dinilai tidak konstitusional.

Setelah pembacaan surat pencabutan kekuasaan, Sukarno duduk terkulai, lemah dan amat sedih. Bambang Widjanarko, ajudan Sukarno menuturkan, “Kelihatan benar betapa terpukul hatinya saat itu. Lama ia duduk diam tanpa berkata sepatah pun. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata, ‘Aku telah berusaha memberikan segala sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia.’”<sup>119</sup>

John Hughes dalam bukunya *The End of Sukarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, menyebutkan,

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

*For almost twenty-two years, President Sukarno cast the spell of his political magic across Indonesia. But in the Indonesian capital of Djakarta on a hot, soggy day in March 1967, the spell was finally broken, the magic run out, the legend was shattered. Sukarno was stripped by the representatives of his people, of the last vestiges of his authority. Instead a 46 year old army general named Suharto was sworn in as Acting President*<sup>120</sup> (Selama hampir dua puluh dua tahun, Presiden Sukarno menebar pesona sihir politiknya melintasi Indonesia. Namun, di ibu kota Indonesia, Djakarta, pada suatu hari yang panas dan lembab pada bulan Maret 1967, pesona itu akhirnya lenyap, sihirnya pun kehilangan kekuatannya, dan legenda itu hancur berantakan. Sukarno dilucuti oleh wakil-wakil rakyatnya sendiri dari sisa-sisa kekuasaannya. Malahan, mereka melantik dan mengambil sumpah seorang jenderal angkatan darat berusia 46 tahun bernama Suharto sebagai Penjabat Presiden).

Berakhir sudah kepemimpinan Sukarno sebagai presiden dengan ditandai pengangkatan Suharto sebagai pejabat presiden.




---

<sup>120</sup> John Hughes, *op. cit.*, hlm. 221.

## BAB IV

### DAMPAK DARI BERAKHIRNYA KEPEMIMPINAN SUKARNO

Sejak Maret 1967, status Sukarno sebagai presiden sudah diambil alih Suharto yang berkedudukan sebagai pejabat presiden.<sup>121</sup> Pada akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan Orde Baru Indonesia, untuk membedakannya dengan Orde Lama dari masa pemerintahan Sukarno. Tak lama setelah Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden pada Juli 1967, Orde Baru mulai menancapkan kekuasaannya ke dalam berbagai bidang kehidupan.

#### A. Politik

Dalam bidang politik, gaya kepemimpinan Soeharto cenderung bersifat sentralistik. Ini dapat dilihat ketika pada tahun 1967, Soeharto menghapuskan empat kementerian angkatan bersenjata yang terpisah dan memegang langsung kekuasaan atas empat angkatan tersebut. Gaya Sukarno yang mendorong persaingan antar keempat angkatan itu digantikan oleh kebijakan Soeharto yang sentralistik. Militer yang lebih terpusat ini juga mengambil alih pemerintahan daerah. Pada tahun 1967, 17 dari 25 provinsi diperintah oleh perwira militer. Sentralisasi kekuasaan dalam lingkaran inti orang-orang militer di sekitar Soeharto berkembang dengan baik pada saat itu.<sup>122</sup>

Arah kebijakan asing pun juga sudah mulai ditetapkan. Salah satunya adalah melalui ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) sebagai landasan regional. ASEAN dibentuk pada bulan Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk memajukan kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara-negara yang antikomunis dalam satu kawasan regional. Indonesia sendiri mengisyratkan ASEAN sebagai lambang kerja sama regional dan memulihkan citra

---

<sup>121</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>122</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 578.

Indonesia sebagai aktor regional yang konstruktif (membangun), bebas dari sentimen era Sukarno dan sikap agresif.<sup>123</sup>

Tujuan politik luar negeri yang baru juga semakin dipertegas oleh Lambert J. Giebels yang mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah mencari peluang di dunia barat. Berulang kali Soeharto menekankan dalam pidato-pidatonya bahwa pembangunan kembali harus diprioritaskan – dan dengan demikian tersirat dalam ucapannya bahwa Orde Lama secara ekonomis hanya akan meninggalkan reruntuhan belaka.<sup>124</sup>

Hubungan diplomatik dengan Malaysia pun dipulihkan. Hal ini juga didukung oleh Soeharto dengan ditandai kunjungan delegasi perwira senior ke Kuala Lumpur. Pada 29 Mei 1966, Adam Malik, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada waktu itu, bertemu dengan Deputy Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, di Tokyo dan konfrontasi akhirnya berakhir. Berakhirnya konfrontasi dipastikan dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian pada 11 Desember 1966. Hubungan diplomatik penuh antara Indonesia dan Malaysia pun benar-benar pulih pada bulan Agustus 1967.<sup>125</sup>

Dalam kancah parlemen juga terdapat pergolakan yang signifikan. Di bawah UUD 1945, presiden bertanggung jawab kepada MPRS. Pada waktu itu, jumlah anggota MPRS berkurang akibat penahanan sekitar 180 anggotanya. MPRS pun kemudian meratifikasi Supersemar, melarang PKI, mengharamkan Marxisme sebagai doktrin politik, dan menuntut pemilu diadakan pada tahun 1968. Kemudian pada bulan Maret 1968, MPRS mengadakan sidang dan memilih Soeharto sebagai presiden untuk masa lima tahun. Hal ini semakin menegaskan keberhasilan dan ketahanan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 581.

<sup>124</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 223.

<sup>125</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 571.

kekuasaannya karena dia sekarang benar-benar menjabat penuh sebagai presiden. Dia juga melantik kabinet baru pada bulan Juni yang diisi lebih banyak oleh teknokrat sipil daripada militer.<sup>126</sup>

Soeharto juga terus menerus berusaha menghimpun elemen-elemen masyarakat yang potensial untuk mendukung kekuasaannya. Hal ini antara lain ia lakukan melalui Golkar. Pegawai pemerintah diwajibkan untuk secara resmi loyal pada pemerintah dan Golkar. Mereka juga diwajibkan untuk menghindari kegiatan dan organisasi-organisasi politik - kecuali kalau kegiatan dan organisasi-organisasi itu diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam kampanye-kampanye pemilu, Golkar juga mendapat dukungan dan perlakuan yang khusus dari pemerintah. Dengan dukungan yang amat kuat dari pemerintah, tidak mengherankan jika dalam pemilu-pemilu dari 1971 hingga 1979 Golkar selalu menang dengan mengantongi rata-rata lebih dari 70% suara, dan penguasa tunggal Soeharto berjaya sampai 32 tahun.<sup>127</sup> Tetapi selama 32 tahun itu pula rakyat Indonesia dipandang sebagai 'massa mengambang' yang kebebasan politiknya terus menerus dikekang.

Orang-orang yang diindikasikan terlibat G30S pun juga mulai dibersihkan. Ini dapat dilihat ketika Soeharto menahan 15 anggota Kabinet Dwikora<sup>128</sup> yang diindikasikan terlibat G30S, termasuk Wakil Perdana Menteri III/Ketua MPRS Chairul Saleh. Dengan ditahannya Chairul Saleh, pimpinan MPRS lainnya segera

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 579.

<sup>127</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 254.

<sup>128</sup> Mereka adalah Dr. Soebandrio (Menteri Kompartemen Luar Negeri), Dr. Chairul Saleh (Ketua MPRS), Ir. Setiadi Reksoprodjo (Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan), Sumardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), Oei Tjoe Tat SH (Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet), Ir. Surachman (Menteri Pengairan Rakyat dan Pembangunan Desa), Jusuf Muda Dalam (Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia), Armunanto (Menteri Pertambangan), Sutomo Martopradoto (Menteri Perburuhan), Astrawinata SH (Menteri Kehakiman), Mayjen Achmadi (Menteri Penerangan), Drs. Moch. Achadi (Menteri Transmigrasi dan Koperasi), Letkol Inf. Imam Sjafie (Menteri Khusus Urusan Keamanan), J. Tumakaka (Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional), Mayjen Dr. Sumarmo (Menteri/Gubernur Jakarta Raya). Lihat James Luhulima, *op. cit.*, hlm. 175.

membersihkan majelis itu dari anggota-anggota PKI dan simpatisannya, serta menggantikannya dengan anggota-anggota baru yang pro Soeharto.<sup>129</sup>

Pemerintah juga dihadapkan pada permasalahan narapidana politik. Di seluruh nusantara, penjara-penjara penuh sesak dengan orang yang ditahan tanpa pemeriksaan pengadilan sejak tahun 1965, yang diperkirakan berjumlah 55.000 hingga 100.000 orang. Mereka dibagi ke dalam tiga kelompok yang menunjukkan tingkat keterlibatan mereka dalam usaha kudeta tahun 1965. Kategori A adalah orang yang terlibat langsung, kategori B orang yang terlibat tidak langsung (anggota PKI atau organisasi massanya atau para simpatisannya) dan kategori C orang yang tingkat keterlibatannya di bawah kategori B (perbedaannya sering tidak jelas). Pada bulan Juli 1969, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memenjarakan sejumlah besar narapidana kategori B di Pulau Buru, Maluku Selatan. Narapidana kategori C diumumkan akan dibebaskan, tetapi kelompok Islam dan anti-PKI enggan menerima para narapidana ini kembali ke masyarakat. Narapidana kategori B tetap dipenjarakan secara permanen, baik itu di Pulau Buru maupun di penjara-penjara lainnya. Para narapidana kategori A harus menunggu lama untuk dibawa ke pengadilan.<sup>130</sup>

Mereka yang terpenjara di Pulau Buru banyak menjalani berbagai macam kerja paksa, kesejahteraan pun sangat kurang. Mereka hanya dijatah makan per satu harinya adalah 500 gram. Itu pun dalam praktiknya terkadang hanya 150 gram. Jam kerja paling sedikit sepuluh jam sehari. Mengingat kondisi geografis Pulau Buru yang masih berupa hutan belantara dan rawa-rawa, para tahanan pun dipaksa untuk bekerja membuka lahan, sawah, ladang, dan juga membuka jalan-jalan.<sup>131</sup>

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

<sup>130</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 583.

<sup>131</sup> M. R. Siregar, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan*, Yogyakarta, Resist Book, 2007, hlm. 248.

## B. Sosial

Dalam bidang sosial, Orde Baru banyak menghadapi masalah sosial yang sangat kompleks. Standar kesehatan dan pendidikan masih rendah. Sebagai contoh misalnya di Jawa, hanya terdapat satu dokter untuk setiap 21,7 ribu penduduk, sedangkan di luar Jawa hanya terdapat satu dokter untuk setiap 17,9 ribu jiwa. Data juga menunjukkan bahwa tingkat melek huruf bagi anak yang berusia 10 tahun adalah 72% di kalangan laki-laki dan 50,3% pada perempuan. Pada tingkat perguruan tinggi, hanya sekitar seperempat dari 1% penduduk (329.300) yang terdaftar di lembaga perguruan tinggi negeri dan swasta, 117.600 di antaranya terdaftar di universitas atau lembaga perguruan tinggi negeri. Jumlah ini agak rendah, tetapi jumlah lulusannya lebih banyak daripada yang bisa dipekerjakan negara karena faktanya tingkat pengangguran bagi lulusan kian bertambah.<sup>132</sup>

Selain itu, segala macam hal yang berbau komunis juga mulai disingkirkan. Pada bulan Oktober 1965, semua aktivitas terbuka PKI di Jakarta dilarang. Masih pada bulan yang sama, serikat buruh komunis SOBSI juga dibubarkan. Pada hari-hari pertama naiknya Soeharto dan kawan-kawan, ada 46 koran yang dilarang terbit. Dengan silih berganti koran-koran jaman Orde Lama dilarang. Sebagai penggantinya muncul koran-koran Orde Baru yang dikontrol oleh Angkatan Darat.<sup>133</sup>

Kontrol ketat yang dilakukan oleh Soeharto dan pemerintahannya juga termasuk di bidang media penyiaran publik, dengan akibat lemahnya lembaga pers dan media massa pada umumnya. Dunia televisi dimonopoli oleh TVRI, stasiun televisi resmi milik pemerintah. Jumlah stasiun radio dibatasi dan masing-masing hanya dibolehkan menyampaikan warta berita versi pemerintah. Dalam bidang media cetak, kontrol Orde

<sup>132</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 562.

<sup>133</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 138.

Baru tampak lebih mencolok. Undang-undang Pers tahun 1966 pun lahir dan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak pers di bawah slogan pers yang bebas tetapi bertanggung jawab. Tentu hanya agen-agen pemerintahlah yang biasanya berhak menentukan apa arti 'bebas' dan apa arti 'bertanggung jawab' dalam suatu pemberitaan. Apalagi dengan diterbitkannya Surat Izin Penerbitan Pres (SIUPP), di mana kalau ada koran atau majalah yang memuat berita yang membuat pemerintah tidak berkenan, maka seluruh perusahaan penerbit surat kabar atau majalah ini akan dikenai sanksi, yang dapat pula berimbas pada ditutupnya penerbitan-penerbitan lain yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut. Melalui cara-cara tersebut, Orba berhasil mengamankan koran atau majalah-majalah yang dianggap kritis terhadapnya.<sup>134</sup>

Dalam bidang religi, juga terjadi gejolak. Terjadi gelombang perpindahan agama ke Kristen yang tak terduga dan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota Jawa Timur dan Jawa Tengah. Perpindahan agama ke Hindu dan Buddha juga terjadi, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil. Perpindahan agama ini sebagian karena alasan agama dan sebagian lagi karena alasan politik. Alasan lainnya adalah karena ketidakpuasan sebagian umat Islam akan perkembangan dasar akidah dengan gayanya yang baru dan lebih dinamis (misalnya seruan salat yang diudarkan dengan suara keras) yang justru tidak membuat mereka tertarik. Banyak juga Islam *abangan* Jawa yang beralih ke Kebatinan, sebuah istilah yang digunakan untuk sekte mistis pribumi dengan teologi campuran.<sup>135</sup>

Ketika tragedi 1965 terjadi, orang memeluk agama bukan karena memang ingin menjadi penganut agama dunia yang dikenal secara resmi, namun lebih karena

<sup>134</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 258.

<sup>135</sup> M. C. Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 576.

khawatir akan diberi label ateis dan komunis jika tidak beragama. Karena itu, sebagian orang Indonesia yang tidak ingin menyebut diri mereka muslim menyatakan diri mereka sebagai Kristen.<sup>136</sup>

### C. Ekonomi

Ketika Orde Baru semakin mengendalikan negara dan peluang bangkitnya pendukung Sukarno menyusut, prospek Soeharto memperoleh bantuan keuangan dalam jumlah besar dari dunia barat semakin meningkat pula. Salah satu masalah pertama Suharto adalah utang luar negeri yang begitu besar yang diwariskan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Pada akhir tahun 1965, jumlahnya mencapai US\$ 2.36 miliar, 59,5% di antaranya merupakan utang kepada negara komunis (42% kepada Uni Soviet), 24,9% kepada negara barat, dan sisanya kepada utang negara-negara non-komunis lainnya. Jepang adalah kreditor terbesar di luar negara-negara komunis (9,8% dari total uang). Walaupun utang ini sangat besar, harus dicatat bahwa jumlah ini jauh lebih kecil daripada utang yang kelak diperoleh Orde Baru. Para kreditor non-komunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama-sama dan akhirnya membentuk IGGI (*International Governmental Group on Indonesia*) pada tahun 1967. Dari bulan Juli 1966, mereka mulai menjadwalkan ulang pembayaran utang Indonesia. Pada bulan Oktober, Adam Malik, yang telah lama memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet, juga menjadwalkan ulang sebagian pembayaran utang Indonesia kepada Uni Soviet.<sup>137</sup>

Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara barat, pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus-menerus dipuji oleh Bank Dunia. Strategi *laissez-faire* (pintu terbuka) untuk meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi maksimum diiringi dengan pengendalian

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 577.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 572.

ekonomi intern yang tegas. Inflasi tahunan juga terhitung melebihi 600%, persediaan uang 800 kali lebih tinggi daripada angka di tahun 1955 dan defisit pemerintah 780 kali lebih banyak daripada tahun 1961.<sup>138</sup>

Saat berkonsultasi dengan IMF (*International Monetary Fund*), para teknokrat memperkenalkan pengendalian anggaran, tarif bunga tinggi, pengendalian ekspor yang lebih ketat, dan langkah-langkah anti korupsi yang akan dimulai bulan Oktober. Perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika yang sebelumnya disita segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pada bulan Februari 1967, undang-undang investasi baru disahkan untuk mendorong investasi asing. Hingga akhir tahun 1968, rupiah dibiarkan mengambang secara bebas. Kebijakan semacam ini mengurangi ekspor gelap dan impor asing dan mendorong pertambahan bantuan dan investasi luar negeri. Sementara itu, pengangguran dan kurangnya pekerjaan semakin meningkat. Pada tahun 1967, para mahasiswa – aliansi-aliansi yang setia terhadap Orde Baru – mulai berdemonstrasi mengkritik Orde Baru, meminta harga diturunkan dan tindakan korupsi dihentikan.<sup>139</sup>

Program stabilisasi ekonomi tersebut juga memunculkan IMF di atas panggung. Delegasi IMF, dengan bantuan para ahli ekonomi, meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa perekonomian Indonesia yang di bawah Sukarno sudah keluar rel, membutuhkan tindakan-tindakan yang drastis seperti pembatasan pemberian kredit oleh bank, pemangkasan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, mengusahakan bahwa pajak memang betul ditagih untuk kemudian diserahkan kepada kas negara, penghentian

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 573.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 576.

subsidi pemerintah untuk minyak tanah dan bensin serta pembatalan kontrol perdagangan.<sup>140</sup>

Pada bulan Agustus 1968, semua perusahaan minyak yang berada di bawah kontrol militer (hasil sitaan perusahaan-perusahaan asing tahun 1957-1958) disatukan dalam wadah yang baru, Pertamina, dengan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai ketuanya. Pertamina lantas diberi hak monopoli atas seluruh industri perminyakan di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya banyak dikontrakkan pada perusahaan-perusahaan asing, dan sayangnya, Pertamina lantas menjadi ajang korupsi yang berskala luar biasa. Keterlibatan pihak asing juga dapat dilihat ketika pada tahun 1967, perusahaan asing Freeport sudah mulai beroperasi di Papua Barat dengan kontrak puluhan tahun.<sup>141</sup>

Adapun pertimbangan untuk menarik penanaman modal asing adalah anggapan bahwa penyusupan modal asing secara spontan akan menggalakkan akumulasi modal domestik. Sebagai efek langsung dari strategi itu dianggap dapat memacu pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8 persen, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja. Tetapi akibatnya, industri kecil di Indonesia telah dipaksa gulung tikar, dengan semakin digalakkannya modal asing. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi semula diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pun tidak menjadi kenyataan. Dalam kurun waktu 1961-1971, elastisitas kesempatan kerja hanya sebesar 0,5% saja, artinya setiap pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 1 persen, hanya menyerap tenaga kerja tambahan sebesar 0,5 persen. Penurunan ini berarti pula menurunnya kemampuan perekonomian untuk menyerap tenaga kerja atau proses produksi menjadi lebih padat modal.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 224.

<sup>141</sup> Baskara T. Wardaya, *op. cit.*, hlm. 260.

<sup>142</sup> M. R. Siregar, *op. cit.*, hlm. 431.

Dari berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa dengan berakhirnya kepemimpinan Sukarno, perekonomian di Indonesia juga belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyaknya modal asing yang masuk hanya mematikan industri kecil sehingga geliat perekonomian di kalangan masyarakat kecil juga semakin menurun.

#### **D. Kehidupan Sukarno setelah Masa Kepemimpinannya Berakhir**

Sejak bulan Maret 1967, status Sukarno pun berganti menjadi tahanan politik. Sukarno hanya diam, ia tak bisa berbuat apa-apa. Selain sudah kehilangan pendukungnya, ia juga kehilangan harapan besarnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara sosialis, dan menggemakan semangat Nasakom. Awal Mei 1967, Sukarno dipindahkan ke Paviliun Istana Bogor. Kepindahan ini cukup mengejutkan bagi anak-anak dan kerabat lain. Pemindahan ini juga terjadi secara sepihak, karena berkaitan dengan posisi Soeharto yang saat itu sudah berstatus presiden, hingga harus menjalankan tugas-tugas keseharian di istana.<sup>143</sup>

Di Bogor, Sukarno seolah hidup sebagai manusia asing. Bukan hanya dari keluarga dan orang-orang yang dicintai, juga dari rakyat yang selalu menjadi cermin bagi perjuangan dan cita-citanya. Sukarno telah dimatikan secara politik. Informasi dari luar terputus, begitu pun dengan fasilitas komunikasi, seperti radio, televisi, dan koran – Sukarno tak diberikan kesempatan untuk menikmatinya. Mulailah ia menjalani kehidupan baru di alam karantina politik.<sup>144</sup>

Memasuki awal tahun 1969, Sukarno mulai tinggal di Wisma Yaso. Hidup Sukarno di Wisma Yaso juga menderita. Dalam masa itu, anak-anaknya tidak boleh mengunjungi dia. Ketika akhirnya izin itu diberikan, mereka menemukan ayah mereka

---

<sup>143</sup> Reni Nuryanti, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

dalam keadaan terbenam dalam depresi. Tabiat gembira dan ringan hati masa dahulu lenyap. Sukarno tidak mempunyai tenaga lagi untuk berbuat apa-apa. Sesudah Sukarno pindah ke Wisma Yaso, Soeharto menunjuk sebuah tim dokter untuk memberi pelayanan medis. Dokter Mardjono, seorang ahli penyakit syaraf dari Rumah Sakit Carolus, mengetuai tim ini. Menurut Mardjono, keadaan fisik Sukarno cukup baik, walaupun ia menolak untuk dioperasi akibat sakit ginjalnya. Sukarno juga kerap berkeluh kesah terhadap dokternya itu. Sukarno menegaskan kepada Mardjono bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam tragedi G30S dan bahwa ia oleh karena itu tidak mengerti mengapa ia diperlakukan sebagai tahanan di Wisma Yaso.<sup>145</sup>

Sampai kemudian pada tanggal 16 Juni, kondisi Sukarno semakin mengkhawatirkan dan harus dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Keesokan harinya ia masih sadar, tetapi sulit untuk berbicara. Hingga pada tanggal 21 Juni, Mardjono sadar bahwa Sukarno sudah tidak mampu bertahan lagi. Sukarno pun memegang tangan dokternya itu dan menghembuskan nafas terakhir. Puluhan ribu orang di Jakarta mengucapkan selamat berpisah kepada Bung Karno ketika jenazah diangkut dari rumah sakit ke Wisma Yaso, tempat almarhum disemayamkan. Dari Wisma Yaso jenazah kemudian dibawa ke lapangan udara militer Halim Perdanakusumah untuk diterbangkan ke Blitar, di mana Sukarno akan dimakamkan. Berjuta-juta orang berdiri di pinggir jalan sepanjang kira-kira 40 km yang ditempuh arak-arakan duka dari Malang menuju Blitar. Sebuah barisan pengawal kehormatan yang terdiri dari semua unsur angkatan bersenjata melepaskan tembakan kehormatan, ketika jenazah diturunkan ke dalam liang kubur yang digali di samping ibunya.<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Lambert J. Giebels, *op. cit.*, hlm. 238.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab II, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi berakhirnya kepemimpinan Sukarno adalah tragedi G30S. Hal ini terutama berkaitan dengan reaksi Sukarno terhadap tragedi tersebut. Dia tetap bersikeras tidak mau membubarkan PKI, yang diduga menjadi dalang dari tragedi, sehingga rakyat pun mulai meragukan kepemimpinan Sukarno. Apalagi setelah pemerintah membentuk Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Jumlah menteri dalam kabinet menjadi 100 orang. Akan tetapi, justru dalam kabinet itu banyak anggota kabinet yang diduga terlibat dalam peristiwa G30S. Ketidaktegasan Sukarno di dalam rangka penyelesaian G30S inilah yang semakin membuat rakyat meragukan kepemimpinan Sukarno sebagai presiden dan dari sinilah, secara perlahan, kepemimpinan Sukarno mulai berakhir.

Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi “Kalau masa kepemimpinan Sukarno berakhir, maka salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah tragedi G30S” dinyatakan terbukti.

2. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses yang mengiringi berakhirnya kepemimpinan Sukarno adalah dikeluarkannya Supersemar, yang dipergunakan oleh Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna mengendalikan keadaan sebagai akibat dari G30S, sehingga kekuasaan Sukarno pun semakin berkurang. Sampai kepada ditolaknya Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, pidato pertanggungjawaban Sukarno terhadap situasi dan kondisi pasca G30S, oleh MPRS. Hal ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan

MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.

Dengan demikian hipotesis kedua yang berbunyi: “Kalau masa kepemimpinan Sukarno berakhir, maka proses yang mengiringinya adalah dikeluarkannya Supersemar dan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara)” dinyatakan terbukti.

3. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat politik dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno adalah beralihnya pemerintahan ke Soeharto (Orde Baru). Selain itu, orang-orang yang dituduh komunis disingkirkan. Ini dapat dilihat ketika Soeharto menahan 15 anggota Kabinet Dwikora yang diindikasikan terlibat G30S. Para tertuduh lainnya pun juga dipenjarakan di Pulau Buru, akibat sosialnya adalah pelarangan koran-koran jaman Orde Lama, sebagai penggantinya muncul koran-koran Orde Baru yang dikontrol oleh Angkatan Darat. Standar kesehatan dan pendidikan pun juga masih rendah, akibat ekonominya yaitu Indonesia mulai menjalin hubungan dengan luar negeri dan juga melakukan pinjaman uang sehingga utang Indonesia pun semakin membesar. Industri kecil juga mengalami kelesuan sebagai akibat dari masuknya modal asing tersebut.

Dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi: “Kalau kepemimpinan Sukarno berakhir, maka akibat politiknya adalah pemerintahan beralih ke Soeharto dan orang yang dituduh komunis disingkirkan, akibat sosialnya adalah pelarangan koran-koran jaman Orde Lama, standar kesehatan dan pendidikan pun juga masih rendah, dan akibat ekonominya yaitu Indonesia mulai menjalin hubungan dengan luar negeri, termasuk dengan melakukan pinjaman uang yang mengakibatkan semakin besar utang Indonesia” dinyatakan terbukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asvi Warman Adam,  
2009: *Membongkar Manipulasi Sejarah, Kontroversi Pelaku dan Peristiwa*. Gramedia, Jakarta.
- Bambang Siswoyo,  
1989: *Menelusuri Peran Bung Karno dalam G30S*. Mayasari, Jakarta.
- Baskara T. Wardaya,  
2006: *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G 30 S*. Galangpress, Yogyakarta.
- Budi Setyono dan Bonnie Triyana (Peny.),  
2003: *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara*. MESIASS, Semarang.
- Dake, Antonie C.A.,  
2005: *Sukarno File, Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*. Aksara Karunia, Jakarta.
- Giebels, Lambert J.,  
2005: *Pembantaian yang Ditutup-Tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. (terjemahan I. Kapitan-Oen). Grasindo, Jakarta.
- Hasta Mitra,  
2002: *Dokumen CIA, Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965*, Hasta Mitra, Jakarta.
- Hughes, John,  
1967: *The End of Soekarno, A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild*, Archipelago Press, USA.
- Imam Soedjono,  
2006: *Yang Berlawanan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Resist Book, Yogyakarta.
- Indra Ismawan dkk.,  
2006: *Kumpulan Pernyataan Bung Karno tentang Gerakan 30 September*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- James Luhulima,  
2007: *Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965: Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain*. Kompas, Jakarta.

- Kansil, C.S.T,  
1984: *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartini Kartono,  
1986: *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Rajawali, Jakarta.
- Kuntowijoyo,  
2001: *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo,  
1996: *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Moedjanto, G.,  
1988: *Indonesia Abad ke 20 Dari Perang Kemerdekaan pertama sampai PELITA III*. Kanisius, Yogyakarta.
- Pambudi, A.  
2006: *Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Reni Nuryanti,  
2008: *Tragedi Sukarno: Dari Kudeta Sampai Kematiannya*. Ombak, Yogyakarta.
- Ricklefs, M.C.,  
2005: *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Serambi Ilmu Pustaka, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo,  
1992: *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia, Jakarta.
- Sekretariat Negara RI,  
1984: *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Siregar, M.R.,  
2007: *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan*. Resist Book, Yogyakarta.
- Soeharto,  
1989: *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K. H.* Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.
- Soelistyati Ismail Gani,  
1984: *Pengantar Ilmu Politik*. Ghalia, Jakarta.
- Solichin Salam,  
1984: *Bung Karno Putra Fajar*. Gunung Agung, Jakarta.
- Sulastomo,  
2008: *Hari-hari yang Panjang, Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar*. Kompas, Jakarta.

Suwarno, P. J.,  
2003: *Tatanegara Indonesia dari Sriwijaya sampai Indonesia Modern*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Talizuduhu Ndraha,  
2000: *Ilmu Pemerintahan*. Hikmah, Jakarta.

Wirjana, Bernardine R. dan Susilo Supardo,  
2005: *Kepemimpinan Dasar-dasar dan Pengembangannya*. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Yuwono, S.  
1983: *Kepemimpinan dalam Organisasi Aparatur Pemerintahan*. Liberty, Yogyakarta.

#### **Internet**

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”,  
1997: [www.kbbi.com](http://www.kbbi.com) diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul 19.35 WIB.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara”,  
2000: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul 20.00 WIB.

“Supersemar”,  
2006: <http://id.wikipedia.org/wiki/Supersemar>, diakses pada tanggal 29 September 2006, pukul 18.05 WIB.

Burhan Azis dan A. Supardi  
2005: “Ngapain Bung Karno Meng-Coup Dirinya Sendiri – Membantah Imajinasi Antonie CA Dake tentang Dalang G30S”, [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com), diakses pada tanggal 26 Maret 2006 pukul 19.54 WIB.

Kikin Asikin,  
1998: “Nawaksara dan Sejumlah Pertanyaan”, [www.munindo.brd.de](http://www.munindo.brd.de), diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul 20.00 WIB.

Munandar, A. S.,  
2005: “Peranan Nekolim dalam Tragedi 1965”, [www.kontak.club.fr](http://www.kontak.club.fr), diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul 19.37 WIB.

Tiarma Siboro,  
1998: Wawancara Majalah *D&R*, 17 Januari 1998, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul. 19.41 WIB.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SILABUS PENDIDIKAN SEJARAH

Satuan Pendidikan : SMA  
 Program : Ilmu Pengetahuan Sosial  
 Mata Pelajaran : Sejarah  
 Kelas / Semester : XII/1  
 Standar Kompetensi : 1. Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga Lahirnya Orde Baru.

| Kompetensi Dasar                                                                                                            | Materi Pokok                                                                                                | Kegiatan Pembelajaran                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alokasi Waktu | Sumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan. | 1. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, terutama pada masa akhir pemerintahan Sukarno 1965-1968. | 1. Menganalisis kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia, terutama pada masa akhir pemerintahan Sukarno 1965-1968. | <p>1.a. Siswa mampu mendeskripsikan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Sukarno.</p> <p>1.b. Siswa mampu menjelaskan hubungan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada kurun 1965-1968 dengan berakhirnya kepemimpinan Sukarno.</p> <p>1.c. Afektif: Siswa mampu menunjukkan contoh kepemimpinan Sukarno yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p> | <p>1. Portofolio (<i>portfolio</i>)<br/>                     a. bentuk: makalah<br/>                     b. alat: skala nilai</p> <p>2. Unjuk kerja (<i>performance</i>)<br/>                     a. bentuk: presentasi<br/>                     b. alat: skala nilai</p> <p>3. Tertulis (<i>paper and pen</i>)<br/>                     a. bentuk: jawaban singkat dan uraian<br/>                     b. alat: tes</p> <p>4. Sikap<br/>                     a. bentuk: observasi<br/>                     b. skala sikap</p> | 1 x 45'       | <p>Lambert J. Giebels. 2005. <i>Pembantaian yang Ditutup-Tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno</i>. (terjemahan I. Kapitan-Oen). Jakarta: Grasindo.</p> <p>M.C. Ricklefs. 2005. <i>Sejarah Indonesia Modern 1200-2004</i>. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.</p> <p>Kartini Kartono. 1986. <i>Pemimpin dan Kepemimpinan</i>. Jakarta: Rajawali.</p> |

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

|  |  |  |                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 1.d.Refleksi: Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil siswa dari masa akhir kepemimpinan Sukarno dalam kehidupan sehari-hari. |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 14 Desember 2009  
Guru Mata Pelajaran

Drs. B. Musidi, M.Pd.

Aloysius Bram Widyanto

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)

1. Satuan Pendidikan : SMA
2. Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Mata Pelajaran : Sejarah
4. Kelas/Semester : XII/1
5. Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.
6. Kompetensi Dasar : 1.4. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.
7. Indikator :
  1. Siswa mampu mendeskripsikan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Sukarno.
  2. Siswa mampu menjelaskan hubungan kondisi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia pada kurun waktu 1965-1968 dengan berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
  3. Afektif: Siswa mampu menunjukkan contoh kepemimpinan Sukarno yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
  4. Refleksi: Menjelaskan nilai-nilai penting yang dapat diambil siswa dari masa akhir kepemimpinan Sukarno dalam kehidupan sehari-hari.
8. Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (satu pertemuan)

### A. Tujuan Pembelajaran

1. Siswa dapat menjelaskan latar belakang berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
2. Siswa dapat mendeskripsikan proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
3. Siswa dapat menganalisis dampak politik, sosial, dan ekonomi dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno.

### B. Materi Pembelajaran

1. Latar belakang berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
2. Proses berakhirnya kepemimpinan Sukarno.
3. Dampak politik, sosial, dan ekonomi dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### C. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

Pendekatan : *Cooperative learning* (CL)

Metode : *Mind Mapping*

### D. Kegiatan Pembelajaran

| No   | Proses Pembelajaran Interaktif                                                                                              | Tahapan Waktu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I.   | <b>Pendahuluan</b>                                                                                                          |               |
|      | <u>Motivasi</u> : Sebutkan nama-nama presiden yang pernah memimpin Indonesia?                                               | 2             |
|      | Apa yang kalian ketahui tentang sosok seorang Sukarno?                                                                      | 3             |
|      | <u>Pengetahuan Prasyarat</u> : Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan?                                                       | 3             |
|      | <u>Rambu-rambu Belajar</u> : Diskusi, pengamatan, dan kesimpulan.                                                           |               |
| II.  | <b>Kegiatan Inti</b>                                                                                                        |               |
|      | 1. Guru menyampaikan kompetensi sesuai indikator yang ingin dicapai                                                         | 2             |
|      | 2. Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa                                                    | 3             |
|      | 3. Membentuk kelompok yang anggotanya 4-5 orang dan memberikan soal-soal atau permasalahan                                  | 2             |
|      | 4. Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat dan menyelesaikan tugas dengan alternatif jawaban hasil diskusi                 | 10            |
|      | 5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca/melaporkan hasil diskusinya dan guru mencatat di papan             | 10            |
|      | 6. Dari data-data di papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai konsep yang disediakan guru | 5             |
| III. | <b>Penutup</b>                                                                                                              |               |
|      | 1. Guru bersama siswa meninjau kembali pelajaran yang baru dipelajari dan membuat rencana tentang pertemuan berikutnya      | 2             |
|      | 2. Bersama-sama melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini                                                            | 3             |

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### E. Sumber Belajar

- Lambert J. Giebels. 2005. *Pembantaian yang Ditutup-Tutupi, Peristiwa Fatal di Sekitar Kejatuhan Bung Karno*. (terjemahan I. Kapitan-Oen). Jakarta: Grasindo.
- M.C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Kartini Kartono. 1986. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.

### F. Penilaian

1. Portofolio (*portfolio*)
  - a. bentuk : makalah
  - b. alat : skala nilai
2. Unjuk kerja (*performance*)
  - a. bentuk : presentasi
  - b. alat : skala nilai
3. Tertulis (*paper and pen*)
  - a. bentuk : jawaban singkat dan uraian
  - b. alat : tes / menjawab soal
4. Sikap
  - a. bentuk : observasi
  - b. alat : skala sikap

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 14 Desember 2009  
Guru Mata Pelajaran

Drs. B. Musidi, M.Pd.

Aloysius Bram Widyanto

**Instrumen / alat penilaian unjuk kerja (*performance*)**

1. Biodata Siswa

- a. Nama :
- b. NIS :
- c. Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :

|                                                                             | Sering | Kadang-Kadang | Tidak Pernah |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>1. Ekspresi fisik</b>                                                    |        |               |              |
| a. Berdiri tegak melihat penonton                                           |        |               |              |
| b. Merubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan yang disajikan |        |               |              |
| c. Mata melihat kepada penonton                                             |        |               |              |
| <b>2. Ekspresi suara</b>                                                    |        |               |              |
| a. Berbicara dengan jelas                                                   |        |               |              |
| b. Nada suara berubah-ubah sesuai pernyataan yang ditekankan                |        |               |              |
| c. Berbicara cukup keras untuk didengar penonton                            |        |               |              |
| <b>3. Kemampuan berbahasa</b>                                               |        |               |              |
| a. Tidak mengulang-ulang pernyataan                                         |        |               |              |
| b. Memilih kata-kata yang tepat untuk menegaskan arti                       |        |               |              |
| c. Menggunakan kalimat yang lengkap untuk mengutarakan suatu pikiran        |        |               |              |
| d. Menyimpulkan pokok-pokok pikiran yang penting                            |        |               |              |

**Instrumen / alat penilaian portofolio**

| No | Kelompok/<br>Nama                  | Materi                                            | Kriteria    |               |                 |                    |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|
|    |                                    |                                                   | Tata Bahasa | Sudut Pandang | Analisa Gagasan | Sistematika Ilmiah |
| 1. | Kelompok 1<br>a.<br>b.<br>c.<br>d. | Latar belakang berakhir-nya kepemimpinan Sukarno. |             |               |                 |                    |
| 2. | Kelompok 2<br>a.<br>b.<br>c.<br>d. |                                                   |             |               |                 |                    |

**Instrumen / alat penilaian sikap**

| No | Nama | Perilaku     |              |                 |                    | Nilai | Keterangan |
|----|------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|------------|
|    |      | Bekerja Sama | Berinisiatif | Penuh Perhatian | Bekerja Sistematis |       |            |
| 1. |      |              |              |                 |                    |       |            |
| 2. |      |              |              |                 |                    |       |            |
| 3. |      |              |              |                 |                    |       |            |

**Instrumen / alat penilaian tertulis (tes)**

1. Jelaskan situasi ekonomi dan sosial pada masa akhir kepemimpinan Sukarno?
2. Mengapa tragedi G30S dapat dikatakan sebagai awal mula dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno?
3. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang agar kontroversi mengenai Supersemar dapat terungkap?
4. Apa yang menjadi alasan MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Sukarno (Nawaksara) ?
5. Sebutkan dampak politik dari berakhirnya kepemimpinan Sukarno?